Hijrah Dunia Muslim Menuju Kebebasan

Kumpulan Review Buku
Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim karya Denny JA

Haidar Bagir, M Alfan Alfian, Ali Munhanif, Airlangga Pribadi Kusman, Sri Yunanto, Muhamad Syauqillah, Agus Wahyudi, Lili Romli, Luthfi Assyaukanie

EDITOR: ANICK HT

Hijrah Dunia Muslim Menuju Kebebasan

Kumpulan Review Buku
Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim karya Denny JA

Haidar Bagir, M Alfan Alfian, Ali Munhanif, Airlangga Pribadi Kusman, Sri Yunanto, Muhamad Syauqillah, Agus Wahyudi, Lili Romli, Luthfi Assyaukanie

EDITOR: ANICK HT

Hijrah Dunia Muslim Menuju Kebebasan

Kumpulan Review Buku

Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim

Karya Denny JA

Editor:

Anick HT

Design & Layout:

Muhamad Alip Noor & Ryansntrs

ISBN : 978-623-6204-13-9

Mei 2020

PENERBIT

Cerah Budaya Indonesia

Hijrah Dunia Muslim Menuju Kebebasan

Kumpulan Review Buku

Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim

Karya Denny JA

Pengantar Editor

Perjalanan peradaban dunia telah membuktikan bahwa sejarah memiliki hukum besinya sendiri. Dan hukum besi itu selaras dengan penghargaan yang lebih tinggi terhadap kehendak manusia: kesetaraan, keadilan, martabat, dan tentu saja kesejahteraan dan kebahagiaan.

Secara umum bahkan bisa diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan adalah tujuan yang secara universal dimiliki oleh sejarah bangsa-bangsa sebagai tujuan umum berdirinya sebuah negara. Nah, bagaimana mengetahui suatu negara sejahtera atau bahagia? Kemajuan ilmu pengetahuan hari ini telah mengantarkan kita untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan dengan metode ilmiah.

Ada banyak lembaga yang membuat pengukuran ini. Ada World Happiness Index yang dibuat oleh UN SDSN (United Nation Sustainable Development Solutions Network). Lembaga ini mendefinisikan kebahagiaan sebagai terpenuhinya kebutuhan personal (pedapatan, kesehatan, pendidikan) dan sosial (menyumbang). Orang yang bahagia adalah orang yang telah tercukupi kebutuhan pribadi dan mempunyai kemampuan untuk menyumbang orang lain yang mengalami kesulitan. Studi ini juga menggeser studi kebahagiaan yang sebelumnya lebih menggunakan pendekatan psikologis individual. Sejak 2012,

secara rutin World Happiness Index ini dirilis.

Pengukuran berikutnya adalah apa yang dipelopori oleh Hossein Askari dan sejumlah sarjana muslim yang mengembangkan apa yang disebut sebagai Indeks Keislaman (Islamicity Index). Meskipun menggunakan istilah "keislaman", indeks ini tidak mengukur hal yang sifatnya keyakinan pribadi dan perilaku pribadi seseorang, seperti: shalat, haji, zakat, puasa, dan sebagainya. Keyakinan dan perilaku pribadi tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan karena tujuan indeks ini bukan untuk menilai bagaimana kepatuhan individu muslim, tetapi bagaimana sumber ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Sejauh mana masyarakat muslim telah mengadopsi dan mempraktikkan ajaran-ajaran dan prinsip al-Quran dalam praktik sosial, ekonomi dan pemerintahannya. Sebuah negara dikategorikan mempunyai Indeks Keislaman yang tinggi jika negara tersebut telah mempunyai praktik sosial, ekonomi, politik, akuntabilitas pemerintahan yang sesuai, meskipun penduduk di negara tersebut mayoritas bukan pemeluk agama Islam.

Indeks kebahagiaan dan keislaman tersebut ternyata secara konsisten menghasilkan temuan yang identik. Negara-negara yang menempati posisi atas adalah negara-negara di wilayah Skandinavia seperti: Swiss, Swedia, Finlandia, Denmark, dan sebagainya. Negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi (seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Hongkong atau Qatar) tidak secara otomatis menempati posisi sebagai negara yang berhasil membuat warganya bahagia. Pendapatan memang

penting, karena dengan pendapatan yang tinggi seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi pendapatan bukan satu-satunya penentu kebahagiaan. Belajar dari negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi, pendapatan itu harus dibarengi dengan penerapan demokrasi modern, menghormati hak asasi manusia, dan berlandaskan konstitusi yang menjamin HAM dan prinsip demokrasi.

Dalam konteks seperti ini, sistem dan prinsip demokrasi menjadi pilihan yang harus diambil dalam tata kelola negara, termasuk negara-negara muslim. Melalui buku *Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim* yang di-*review* oleh para pakar dalam buku ini, Denny JA menawarkan peta jalan untuk dunia muslim, menuju demokrasi dan kebebasan.

Islam dan Dunia Muslim

Salah satu pertanyaan yang memiliki sejarah panjang tak berkesudahan di kalangan kaum intelektual muslim adalah: apakah demokrasi berkesesuaian dengan Islam? Polemik berkepanjangan menyertai pertanyaan ini. Di satu sisi, banyak intelektual menyimpulkan betapa jauhnya perbedaan demokrasi dengan Islam. Islam bersandar pada kedaulatan Tuhan, sementara demokrasi bersandar pada kedaulatan rakyat. Di sisi yang lain, banyak pula intelektual yang berkesimpulan, pada dasarnya prinsip-prinsip Islam sejalan dengan demokrasi, dan untuk itu Islam versus demokrasi tidak layak dipertentangkan.

Buku Denny JA ini dimulai dengan pernyataan provokatif bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sia-sia belaka. Pertanyaan ini tak akan memberi kepastian apa pun karena beragamnya interpretasi. Apalagi kita pun membaca sejarah. Apa yang terjadi pada dunia nyata bukan semata produk sebuah interpretasi agama, tapi juga hasil pertarungan nyata kekuatan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan provokasi itu, kemudian Denny JA juga menyediakan jawaban atas pernyataan itu. Bahwa gelombang peradaban besar akan bekerja lebih kuat dari rezim manapun. Gelombang itu akan membawa 50 negara muslim menuju pilihan demokrasi dan kebebasan. Dan Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia yang sangat layak menjadi model. Namun, untuk menuju ke pilihan demokrasi dan kebebasan itu, negara muslim perlu terminal awal mengingat rute yang akan ditempuh agak jauh. Terminal awal itu adalah apa yang disebut sebagai *illiberal democracy*. Ini mengandaikan, kita tidak bisa berasumsi bahwa negara-negara muslim itu akan langsung menerapkan demokrasi seutuhnya. Perlu tahapan-tahapan yang bisa jadi panjang. Namun, sejarah akan menuju ke sana. Dan harus menuju ke sana.

Betapapun, tidak ada sistem politik maupun ekonomi di dunia ini yang bisa dianggap paripurna dan bisa diterapkan begitu saja di semua negara di dunia. Namun jalan paling memungkinkan yang tersedia saat ini adalah jalan demokrasi. Pada waktunya, sejarah akan membawa negara-negara di manapun dunia ini akan menuju ke sana, termasuk negara-negara muslim.

Namun jalan menuju ke sana bisa sangat bervariasi, dan tentu saja, membutuhkan pionir-pionir demokrasi untuk terlibat dan berkontribusi mendorongnya. Tawaran Denny JA ini salah satunya.

Peta jalan yang diberikan oleh Denny JA dalam buku ini memang mengarah kepada satu idealitas demokrasi yang disebut demokrasi liberal ala Barat. Pertanyaan yang bisa diajukan kemudian: apakah memang hanya ada satu jalan menuju ke sana? Atau, apakah standar demokrasi ideal adalah demokrasi ala Eropa dan Amerika Serikat?

Demokrasi liberal telah membawa negara-negara Barat pada kemajuannya. Namun juga ada contoh lain: China dan Korea Selatan mencapai modernitas dan demokrasi dengan cara mereka sendiri. Mungkin juga negara muslim perlahan mampu merumuskan rutenya sendiri menuju demokrasi dan kebebasan. Dunia Islam memiliki sejarah, budaya, nilai-nilai, dan religiositasnya sendiri.

Tentu saja, provokasi dan diskursus seperti ini harus terus digulirkan. Dan Denny JA telah dengan berani menawarkan menggunakan Indonesia sebagai model. Bukan hanya karena Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar di dunia. Bukan hanya karena Indonesia sudah masuk kategori demokrasi setengah matang (*flowed democrocy*) bersama Malaysia dan Tunisia, meninggalkan negara-negara muslim lain. Namun juga karena kedekatan kultur dan basis religiositas Indonesia lebih memungkinkan untuk mendorong kampanye ini ke segala

penjuru mata angin.

Nah, mampukah Indonesia membabat alas menyediakan rute untuk saudara-saudaranya di sebelah sana? Atau, haruskah negara-negara muslim merumuskan jalannya sendiri menuju ke sana? Ini pertanyaan untuk kita semua.

Buku ini adalah kumpulan *review* terhadap buku Denny JA tersebut dari beberapa pakar yang memiliki concern tinggi terhadap isu demokrasi maupun isu Islam. Dengan latar belakang disiplin ilmu yang relatif beragam, terlihat bahwa *review-review* yang ada dalam buku ini memberikan perspektif yang lebih luas dan beragam, untuk melengkapi, maupun memberikan analisis kritis terhadap stimulasi yang dilontarkan oleh Denny JA.

Anick HT

Daftar Isi

Demokrasi dan Kebebasan Pun Bertahta di Dunia Muslim?

***Denny JA, Ph.D*[1]**

Bagaimanakah wajah dunia saat itu? Saat ketika 50 negara yang mayoritas penduduknya muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan? Pastilah dunia terasa rumah yang lebih damai, lebih bersinar, dan lebih nyaman untuk tinggal.

Tapi mungkinkah itu? Mungkinkah mayoritas 50 negara muslim berbondong-bondong atau berangsur-angsur hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan?

Jawabnya tak hanya mungkin, tapi harus. Ia mungkin karena sistem yang tumbuh di satu negara adalah anak kandung dari dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Terbanglah lebih tinggi melihat lima ribu tahun peradaban. Apa yang kita lihat? Tak lain dan tak bukan yang nampak hanya satu: Yang tak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.

Bekerjanya hukum sosial selalu mungkin memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan.

Lebih dari mungkin, ia harus! mayoritas 50 negara muslim harus memeluk demokrasi dan kebebasan. Selalu lahir para pemimpi,

---

[1] Ini adalah Pengantar Denny JA untuk buku "*Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim; Indonesia Sebagai Model?*"

pejuang, pahlawan yang inginkan lebih.

Pew Research Center, lembaga peneliti berpusat di Amerika Serikat, menyatakan sejak tahun 2070 nanti penduduk muslim akan menjadi terbanyak di dunia.

Hadirnya negara muslim yang bebas dan demokratis, atau yang sebaliknya, akan mempengaruhi dunia nyaman atau bergolak. Apalagi saat itu, mulai tahun 2070, muslim adalah populasi paling banyak.

Demi dunia yang lebih baik, mayoritas 50 negara muslim harus hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Yang tersisa kemudian adalah kapan dan bagaimana?

Maka kita pun menyelam mengelaborasi "*the social origin of democracy and freedom*". Asal usul dan kekuatan sejarah yang melahirkan demokrasi serta kebebasan itu yang menjadi kunci.

-000-

Sejarah akademik telah mengajarkan kita untuk melampaui dua jenis kesia-siaan. Kesia-siaan pertama adalah pertanyaan apakah Islam dan demokrasi itu sesuai atau tidak? Apakah ajaran Islam dan nilai dasar demokrasi itu *compatible*?

Ini pertanyaan yang sia-sia karena Islam sebagaimana agama lain, dan konsep besar lain adalah wilayah interpretasi. Selalu tersedia interpretasi dari ujung kiri, tengah hingga ujung kanan.

Di ujung kanan ada ulama dan akademisi tipe Sayyid Abul

Maududi (1903-1979) dan Sayyid Qutb (1906-1966). Dengan seluruh pengetahuannya, ia menjelaskan prinsip Islam berbeda dengan demokrasi.

Demokrasi bersandar pada kedaulatan rakyat. Sedangkan Islam bersandar pada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, negara harus dibangun dengan prinsip agama. Negara bagian dari agama. Sedangkan demokrasi memisahkan wilayah agama dan negara.

Namun di ujung kiri, ada pula akademisi muslim yang tak kalah piawai: Abdul Karim Soroush (1945-). Ia berpandangan sebaliknya. Islam itu selalu berasosiasi dengan demokrasi dan kebebasan.

Menurut Soroush, dan ulama lainnya, ajaran Islam itu bertumpu pada nilai *Hurriyah* (kebebasan), *Adl* (justice), *Shurah* (konsultasi), dan *Ijtihad* (interpretasi rasional). Inti ajaran Islam ini paralel dengan prinsip demokrasi dan kebebasan.

Di ujung kanan ada gerakan Wahabi. Ia kubu Islam yang konservatif. Kubu ini tak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dirumuskan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Tapi di ujung kiri ada gerakan *Progressive Muslim*. Ini gerakan yang mendukung wanita sebagai imam sholat bahkan bagi para pria. Gerakan ini juga menyediakan mesjid bagi pernikahan homoseksual.

Pertanyaan apakah Islam selaras dengan demokrasi tak akan

memberi kepastian apa pun karena beragamnya interpretasi. Apalagi kita pun membaca sejarah. Apa yang terjadi pada dunia nyata bukan semataproduk sebuah interpretasi agama, tapi juga hasil pertarungan nyata kekuatan sosial, politik dan ekonomi.

Kita pun tak lagi mengulangi kesia-siaan yang kedua. Yaitu membaca masa depan dikerangkeng oleh apa yang ada di masa kini. Misalnya, karena kini di antara 50 negara muslim itu tak ada satu pun yang mencapai tahap *Full Democracy*, maka demokrasi tak akan berbuah di wilayah muslim.

Memang benar, itulah data mutakhir. Indeks Demokrasi yang dilaporkan Economist Unit Index di tahun 2019 soal Dunia Muslim memang memprihatinkan.

Dari 60 negara mayoritas muslim, 50 negara yang ada datanya, tak ada satu pun yang mencapai kualifkasi *Full Democracy*. Yang berada di tahap *Flowed Democracy* hanya 6 persen (3 negara): Malaysia, Tunisia, Indonesia. Yang berada pada tahap Rezim Campuran (*Hybrid Regimes*) ada 34 persen atau 17 negara. Sekitar 60 persen negara muslim (30 dari 50 negara muslim) berada pada kasta paling rendah sistem politik: Politik Otoriter.

Namun sejarah mengajarkan pula. Data masa kini adalah produk pertarungan sosial, ekonomi, politik dan kultur masa kini pula. Masa depan tak terikat masa kini. Kelompok sosial terus tumbuh dan bergolak.

Lihatlah Uni Soviet dan Blok Eropa Timur. Tahun 1946 sampai 1989-an itu wilayah komunisme. Jika kita melihat data

kawasan itu di tahun 1970, misalnya, tentu hal yang mustahil membicarakan kemungkinan di kawasan itu beroperasi sistem politik dan ekonomi di luar komunisme.

Tapi lihatlah sekarang. Di kawasan itu, 29 negara sedang hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Kecepatan hijrah tentu berbeda-beda antar negara.

Tak ada satu kawasan di bumi ini yang tercipta untuk kontrak mati memeluk satu jenis sistem politik dan ekonomi apa pun seumur zaman. Lihatlah sejarah peradaban. Apa yang kita sebut dengan kawasan Dunia Barat, Dunia Eropa Timur, Dunia Muslim, semua berubah. Semua hanyalah produk pertarungan dinamika sejarah.

-000-

Demikianlah buku ini dibuat dengan pandangan yang provokatif untuk tiga hal. *Pertama*, pada waktunya mayoritas 50 negara muslim akan hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan.

Gelombang besar peradaban bekerja lebih kuat dari rezim mana pun. Hanya saja perjalanan menuju demokrasi dan kebebasan terjadi secara bertahap.

Kedua, di antara 50 negara muslim itu, Indonesia layak menjadi model. Bukan saja karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bukan saja karena Indonesia berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilu (pemilihan umum) yang damai. Tapi di Indonesia juga tumbuh

kultur politik yang kuat tak ingin menjadi negara agama.

Ketiga, rute awal yang harus ditempuh 50 negara muslim itu menuju demokrasi dan kebebasan adalah demokrasi yang tidak liberal. Demokrasi iliberal menjadi semacam terminal pertama hijrah itu.

Kultur liberal seperti negara yang melegalkan pernikahan homoseks, misalnya, belum bisa dipaksakan di kawasan itu, di masa kini.

Namun zaman terus berubah. Toleransi atas perbedaan agama dan orientasi seksual akan terbentuk melalui waktu. Prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) sudah menjadi gelombang peradaban. Pada waktunya, prinsip itu akan pula diterima dalam ruang publik Dunia Muslim.

Bukankah memang demikianlah sejarah bergerak? Di abad ke-17, misalnya, perbedaan agama mungkin berakhir dengan tindakan saling membunuh. Kini manusia bisa hidup berdampingan dengan keyakinan masing-masing.

Mengapa buku ini menyebut 50 negara muslim? Bukankah negara muslim anggota OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) di tahun 2020 berjumlah 57 negara? Buku ini membatasi hanya pada 50 negara muslim saja, yang mayoritas penduduk muslimnya di atas 50 persen. Dan pula dibatasi oleh ketersediaan data untuk analisa.

-000-

Setelah mengeksplorasi demokrasi dan kebebasan di Dunia Muslim, buku ini selayang pandang menampilkan sejarah demokrasi dan kebebasan di dunia. Tak hanya disinggung demokrasi di Amerika dan Inggris. Tak hanya dibahas sekilas kebebasan di Jerman, Prancis, Rusia, Afrika, tapi juga di India dan dunia ketiga lain.

Saya mengucapkan terima kasih kepada aneka pihak yang membantu lahirnya buku ini. Antara lain AE Priyono dan Fitri Hari yang membantu mengumpulkan data mutakhir.

Kita sedang menunggu gelombang keempat demokrasi dan kebebasan. Gelombang pertama dimulai oleh Inggris dan Amerika di abad 18-20. Gelombang kedua meluas setelah Perang Dunia II. Gelombang ketiga ketika melanda kawasan Komunisme Soviet dan Eropa Timur. Gelombang keempat ialah ketika melanda 50 negara muslim.

Seperti ucapan Victor Hugo: "*Tak ada yang lebih kuat dibandingkan gagasan yang waktunya telah tiba.*" Gagasan demokrasi dan kebebasan telah tiba di Dunia Muslim.

Sisa waktu milik para pejuang. Merekalah yang akan membuat gagasan itu bertahta.*

Febuari 2020

Tarik Menarik Jalan Demokrasi dan Jalan Fundamentalistik

Dr. Haidar Bagir

Saya harus mulai dengan mengatakan bahwa *Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim* adalah sebuah buku yang amat perlu ditulis di masa sekarang ini. Suatu masa yang di dalamnya ada tarik-menarik yang amat kuat antara jalan demokrasi dan jalan fundamentalistik (bahkan, meminjam istilah Maxime Rodinson, integristik) di Dunia Islam. Buku ini menjadi lebih penting karena adanya dua kelebihan lainnya. *Pertama*, buku ini ditulis dengan banyak menyandarkan penarikan kesimpulannya atas data-data penelitian--suatu hal yang secara alami kita harapkan dari seorang penulis-peneliti seperti Sdr. Denny JA. *Kedua*, betapa pun juga, buku ini ditulis tetap dengan mempertahankan sifat populer dan ringkasnya. Karenanya buku ini sangat aksesibel buat kelompok intelijen mana pun dalam masyarakat kita, yang ingin tahu lebih banyak tentang trajektori sistem politik di negerinya sekarang ini. Karena, selama ini tidak sedikit buku ditulis orang tentang soal sejenis, hanya saja saya khawatir buku-buku itu hanya beredar di kalangan elite dan kesarjanaan Islam saja. Sementara, tanpa menyangkal bahwa kaum terpelajar punya peran besar dalam membentuk suatu bangsa, tanpa dukungan lapisan-lapisan yang lebih luas dari masyarakat intelijen awam pada umumnya,

perubahan-perubahan yang diharapkan ke arah demokrasi menjadi lebih sulit diwujudkan. Maka, slogan paling pas—meski klise—untuk buku ini adalah "enak dibaca dan perlu". Apalagi kesemuanya ini dicapai tanpa menjadikannya kehilangan sifatnya yang bertanggung jawab secara ilmiah.

Buku ini memang mulai dari pengertian-pengertian dasar, apa itu demokrasi, dan apa itu demokrasi liberal (dan iliberal, yakni demokrasi nirkebebasan). Apa saja faktor-faktor yang bisa melahirkan demokrasi. Maka Denny dengan berani menyebut kapitalisme sebagai kekuatan utama pewujud demokrasi di suatu negara. Yakni, kapitalisme yang melahirkan lapisan kelas menengah. Bahwa makin banyak anggota kelas menengah di suatu negeri, makin besar kemungkinan berkembangnya demokrasi di negeri itu. Dalam rangka menjelaskan hal ini, penulis menunjukkan betapa justru negara-negara yang memiliki sumber daya melimpah umumnya gagal mengembangkan sistem demokrasi. Kenapa? Dalam bahasa saya, kepemilikan sumber daya melimpah itu justru menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efisien. Masyarakat pun seperti termanjakan, sehingga tuntutan akan kebebasan tidak terasa mendesak. Maka penulis pun memaparkan berbagai contoh sistem demokrasi di berbagai wilayah lain sebagai latar belakang. Termasuk sistem demokrasi Pancasila yang berkembang di negeri kita dengan segala kekhasannya.

Kelemahan buku ini, yang sebetulnya hanya merupakan ekses dari kelebihannya—yakni sifat ringkas dan populernya—adalah tak ada ruang lebih banyak untuk diskusi yang lebih kritis dan

lebih mendalam. Misalnya, apakah ada jebakan juga dalam negeri yang sukses secara kapitalistik yang—seperti dalam negara yang memiliki keberlimpahan sumber daya—dapat membuat masyarakatnya menjadi manja dan tak terlalu peduli mengenai kebebasan juga? Singapore pernah dianggap sebagai contoh dalam hal ini. Betapa kesuksesan kapitalisme—meski bersandar pada perusahaan-perusahaan milik negara—telah membuat bahkan generasi muda mereka apatis secara politik?

Hal lain yang menonjol dari buku ini, dalam segenap kelebihannya—atau, sekali lagi, sebagai ekses kelebihannya, yang sudah saya sebut di atas—adalah kesan (impresi) sikap historisistik dalam *outlook* penulisnya. Bahwa demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang ideal, dan bahwa semua negeri—dalam hal ini negeri-negeri muslim—mau tak mau akan mengadopsinya jika mereka ingin negerinya makmur dan masyarakatnya bahagia. Bahkan, justru jika kaum muslim ingin menjadikan negaranya lebih Islami--bukan secara simbolik, melainkan lebih dari sisi pencapaian "ideal moral syari'ah" (*maqashid syar'iyah*) sebagaimana dicerminkan dalam "Islamicity index". Hal ini, selain terkesan di sepanjang pembahasan, tampak menonjol dalam bab yang dari judulnya saja sudah berbunyi: *"Gelombang Demokrasi dan Kebebasan akan Melanda Dunia Muslim"*. Ya, barangkali benar bahwa demokrasi adalah masa depan Dunia Islam. Tapi, betapa banyak jenis demokrasi dan betapa riuhnya wacana tentang ini di kalangan kaum dan pemikir muslim sendiri, bahkan di kalangan pemikir politik non-muslim.

Kenyataannya, para pemikir politik Islam sepanjang sejarah bisa berbeda pendapat dalam sistem politik yang paling pas meski sepakat mengenai tujuan-tujuan akhirnya. Para pemikir politik Islam klasik—utamanya al-Farabi—belajar antara lain dari para pemikir Yunani seperti Plato--misalnya, juga menjadikan peraihan kebahagiaan (*the attainment of happiness, tahshil as-sa'adah*) sebagai tujuan akhir. Sehingga, dan ini ekstrem lain, terkadang terkesan menempatkan hal itu sebagai bertentangan dengan kebutuhan manusia akan kebebasan. Al-Farabi, misalnya, lebih memujikan al-Madinah al-Fadhilah (*The Virtous State*, Negara Bajik) yang autoritarian di atas segalanya--betapa pun juga melihat potensi lahirnya negara sedemikian dari negara demokratis. Nah, kelemahan pendekatan yang bersifat historisistik ini adalah adanya jebakan bersikap selektif dalam menyajikan data dan informasi. Dengan kata lain, terlalu terfokus hanya pada data dan informasi yang mendukung tesisnya saja.

Lalu ada sebuah saran mungkin untuk edisi selanjutnya, baik juga jika disediakan barang beberapa halaman tulisan, tentang pemikiran politik dari sarjana muslim sendiri tentang fungsi positif demokrasi bahkan sebagai saluran penerapan syariah—tentu sebagai apa yang oleh Charles Kurzman disebut sebagai syariah "liberal"—ke dalam sistem politik suatu negara. Pemikiran Abdullahi an-Na'im kiranya bisa menjadi sampel yang bagus. Ringkasnya, an-Na'im berpendapat bahwa justru syariah akan paling baik masuk ke hukum positif lewat jalur *public reasoning* (penalaran publik). Dengan kata lain lewat prosedur demokrasi. Hal ini mengingat bahwa syariah mempunyai banyak

variasi. Juga terikat konteks penetapannya. *Public reasoning*, di samping bisa membantu penerimaan syariah dengan suka rela, dapat memastikan bahwa varian syariah yang diterapkan adalah yang paling *appropriate*. Tak bisa dipungkiri bahwa pandangan an-Na'im ini banyak dipengaruhi oleh gurunya, Mahmud Muhammad Thaha—konon juga seorang sufi yang dipengaruhi Ibn Arabi—bahwa syariah yang perlu diterapkan, adalah yang terbentuk pada periode Makkah. Dengan kata lain, syariah tentang negara Islam, yang umumnya merupakan respons dari kejadian-kejadian sangat spesifik dan terikat ruang-waktu (*expediencies*) yang berlangsung di Makkah pra-Hijrah--menjadi tak relevan untuk masa-masa setelahnya. Pandangannya inilah yang kemudian dianggap mensubversi gagasan tentang Negara Sudan berdasar Syariah yang digadang-gadang oleh Numeiri, sehingga berakhir dengan hukuman mati atas sang ulama. Mungkin bagus juga, dalam konteks ini jika sistem demokrasi Pancasila yang diajukan oleh penulis sebagai model yang baik untuk proyek demokratisasi Dunia Islam, diteroka agak lebih jauh melalui pemikiran para pemikir politiknya seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Kuntowijoyo, dan sebagainya.

Selebihnya, ini adalah sebuah buku yang saya amat anjurkan untuk dibaca siapa saja. Sebuah buku penting yang mencerahkan dan hadir di suatu waktu yang pas. Untuk itu mewakili pembaca, saya hendak menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sdr. Denny JA—yang sudah sering saya dengar dukungannya kepada upaya-upaya baik dalam bidang keilmuan dan sosial—

atas jerih payahnya menulis buku ini. *Jazakumullaah khayr katsiir*.

***

Dr. Haidar Bagir

Doktor dan pengajar di bidang Filsafat/Mistisisme Islam, President Director Mizan Group, dan pegiat di bidang dakwah Islam Cinta, serta di bidang filantropi.

Islam, Demokrasi, dan Sejarah Masa Depannya

Dr. M Alfan Alfian

Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia sebagai Model? Itulah judul buku Buku Denny JA yang hendak saya komentari di tulisan ini. Secara tematik, sungguh menarik, kendati terasa sebagai tema abadi. Kajian tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, tentu bukan asing lagi. Di Indonesia, tema ini melonjak sejak Era Reformasi. Lazim isu ini dikaitkan dengan perubahan iklim dan sistem politik nasional. Perbandingannya, kondisi yang berbeda dengan semasa Orde Baru.

Kini, Era Reformasi sudah berjalan lebih dua dekade. Apakah Indonesia bisa menjadi model bagi penerapan demokrasi dan kebebasan? Tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini. Jawaban optimis, bisa segera bersanding dengan yang sebaliknya. Kendati demikian, hingga kini kita masih optimis bahwa aktor-aktor utama dalam Islam di Indonesia, cenderung melangkahkan ke arah demokratisasi. Manakala demokrasi dipersempit maknanya ke konteks elektoral, maka tantangannya sekadar memperbaiki kualitas dalam pengaturan dan praktiknya. Namun, manakala demokrasi dikaitkan dengan isu-isu kebebasan yang lebih luas, kontestasi gagasan tak terelakkan.

Yang menarik dari buku Denny JA ialah, ia mengajak kita untuk tidak sekadar meninjau ke dalam, tetapi kaya dengan perbandingannya dengan negara-negara lain. Subjudul Indonesia sebagai model, dalam tanda tanya, mengajak kita untuk melakukan proses generalisasi terhadap karakter muslim Indonesia, yang sesungguhnya tak terelakkan lagi, beragam. Saya kira masih butuh proses panjang bagi muslim Indonesia untuk menerima kriteria kebebasan substansif. Namun, tak ada salahnya manakala optimisme dikembangkan sejak kini.

Jika ukurannya kini, kondisi negara-negara muslim memang masih serba terbatas dalam pengimplementasian kriteria-kriteria yang lazim diterapkan dalam indeks demokrasi. Sebagaimana dikutip buku ini, indeks demokrasi yang dilaporkan *Economist Unit Index*, pada 2019, dari 60 negara mayoritas muslim belum ada satu pun yang mencapai kualifikasi *full democracy*. Yang *flowed democracy* hanya tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Lantas, kategori *hybrid regimes*, 17 negara. Sisanya, otoritarian.

Melihat fenomena demikian, rasanya negara-negara muslim seperti tak bergerak maju, terjebak dalam dilema lama. Di satu sisi, wacana bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi, populer dan memberi optimisme. Tetapi di sisi lain, praktik kepolitikan atau keseharian yang memberi toleransi pada antidemokrasi atau iliberal, belum sepenuhnya terhapus. Dilema atau paradoks semacam ini, akan terus berproses sepanjang sejarah.

Denny JA dalam buku ini tampak optimis melihat gerak sejarah masa depan. Sebagaimana ditulisnya dalam kata pengantar,

"data masa kini adalah produk pertarungan sosial, ekonomi, politik dan kultur masa kini pula". Sedangkan, "masa depan tak terikat masa kini", di mana "kelompok sosial terus tumbuh dan bergolak". Dia mencontohkan, bagaimana Uni Soviet dan Blok Eropa Timur jatuh. Dia mengingatkan yang intinya, apa yang ada kini dan ke depan, "hanyalah produk pertarungan dinamika sejarah".

Ke manakah ujung sejarah? Bak Francis Fukuyama, Denny JA membawa kita ke "demokrasi dan kebebasan". Arus sejarah akan mengalir ke sana. Dan, negara-negara muslim pun tak terelakkan. Memang masih akan dijumpai hambatan-hambatan, terutama pada praktik iliberal. Tapi, saya kira hambatan yang paling kuat ialah masalah pola pikir (*mindset*) para aktornya. Perubahan *mindset*, butuh proses yang dinamis. Sejarah akan mengujinya.

Dalam konteks dinamika sejarah, perubahan *mindset* yang lantas mengubah kultur sosial dan politik masyarakat, bukanlah sesuatu yang semata-mata *absurd*. Proses sejarah, ada kalanya memberi ruang pada hal-hal yang sebelumnya, kurang atau tidak bisa terjelaskan. Sebagai suatu peradaban yang kaya pengalaman sejarah, Islam bukan entitas yang statis. Islam, sepanjang sejarah peradabannya, juga bukan entitas tertutup atau yang menutup diri dari perubahan atau perkembangan dan dialog. Kebesaran peradaban Islam, termasuk dalam konteks penguasaan sains dan teknologi, ialah karena perjumpaan-perjumpaan kreatif dengan tradisi-tradisi lain.

Demikian pula dalam konteks perkembangan sosial dan politik dunia Islam yang memungkinkan adanya proses dan pembelajaran terus-menerus. Dunia muslim telah berubah sepanjang abad-abad menunju era modernitas, bahkan hingga kini dan ke depan. Masyarakat atau umat Islam di era kini dan ke depan akan dihadapkan pada banyak pelajaran, kalau bukan pencerahan.

Ambil contoh, bagaimana para ulama dan aktor-aktor keagamaan yang berpengaruh, harus menerima jalan yang rasional dalam menghadapi pandemi virus corona (covid-19). Makkah ditutup. Salat Jumat ditiadakan. Kriteria-kriteria rasional untuk menghindari pandemi, ditegakkan. Yang menyangkal, akan fatal. Ini merupakan pelajaran berharga dari sejarah. Rasionalitas yang tanpa harus ditabrakkan dengan keimanan, tak terelakkan akan ditempatkan sebagai bagian penting, kalau bukan yang terpenting dalam menyikapi keadaan yang genting.

Saya sepakat dengan gagasan besar buku ini, bahwa sejarah masa depan demokrasi dan kebebasan pun akan terbentuk oleh pengalaman kolektif umat manusia. Tentu, yang diharapkan mengambil peran strategis ialah kelompok-kelompok sosial strategis, dengan tidak mengabaikan umat Islam lapis bawah yang plural. Umat yang rasional-kritis, itulah yang diharapkan akan membesar dan merata, sehingga menutup kesempatan bagi sosok populis yang hendak mamanipulasi, sekedar untuk kepentingan politik jangka pendek, yang seringkali cepat menjadi antidemokrasi atau iliberal.

Jalan bagi demokrasi dan kebebasan, terbuka dalam sejarah masa depan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia punya peluang ke arah sana, dan berpotensi pula sebagai model. Dari sisi demokrasi politik, yang meniscayakan demokrasi sosial dan kultural, sejak Pendiri Bangsa mendesain negara Republik Indonesia, maka kita terus belajar berdemokrasi. Kendati mengalami era pasang naik dan surut, itu semua memberi khazanah, setidaknya, demokrasi bukan sesuatu yang asing.

Hingga dewasa ini, sesungguhnya banyak yang bergumam pada praktik demokrasi yang belum sempurna. Antara elite dan masyarakat, lazim saling menyalahkan satu sama lain sebagai yang bertanggung jawab terhadap kemerosotan kualitasnya dalam praktik. Praktik pragmatisme transaksional setiap pemilu, misalnya, tidak akan bertahan sebagai masalah abadi, manakala tingkat kesejahteraan telah merata dan tinggi. Demokrasi, kebebasan, memang juga terkait dengan konteks kesejahteraan, hal yang masih terus diperjuangkan oleh siapapun yang memimpin negeri ini.

Maka, tak berlebihan kiranya, masa depan demokrasi dan kebebasan juga terkait dengan variabel manajemen kebangsaan. Survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa, juga akan berhadapan dengan dinamika sejarah. Politik internasional juga jelas akan berpengaruh di sini, bagaimana Indonesia bergumul dalam dinamika regional dan internasional.

***

Dr. M Alfan Alfian

Direktur Magister Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta. Penulis lahir di Klaten, 15 Februari 1973, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), S-2 Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, dan S-3 Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Menulis disertasi tentang militer dan politik di Turki, yang juga telah dibukukan. Dia juga aktif di Majelis Nasional KAHMI dan sebagai anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah. Penulis dikenal juga sebagai kolumnis di sejumlah media massa.

Jalan Terjal Kaum Muslim Demokrat

Prof. Ali Munhanif, Ph.D

Mengamati dengan seksama pergolakan sosial dan politik di Dunia Islam dewasa ini, segera kita tersentak oleh sejumlah teka-teki tentang masa depan negara-negara Islam. Proses politik yang terjadi dalam dalam transisi menuju demokrasi seakan terganjal oleh tantangan struktural yang tidak mudah. Solusi atau penyelesaian politik seperti apa yang akan diambil oleh negara-negara yang saat ini dilanda tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan di awal abad 21 ini?

Buku *Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Islam: Indonesia sebagai Model?* yang ditulis Denny JA ini boleh jadi lahir dalam konteks keprihatinan itu. Negara-negara lain di dunia, khususnya yang telah memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang mapan, boleh jadi menunjukkan pengalaman tidak jauh berbeda dalam memperjuangan demokrasi. Tapi mengapa negara-negara di Dunia Islam seolah ingin mengulang tragedi kemanusiaan bahkan melebihi apa yang terjadi di Eropa, Amerika bahkan negara-negara lain di Asia? Saat ini peristiwa kemanusiaan seperti perang saudara, arus pengungsi, hancurnya tatanan politik, kemiskinan, penistaan perempuan dan kekerasan sedang terjadi—mungkin akan terus mengemuka hingga beberapa dekade ke depan—dalam proses perubahan di Dunia Islam.

Kombinasi Kultural dan Struktural

Apa yang menarik—mungkin yang menjadi pesan penting dari buku ini—adalah kehendak penulisnya untuk menyuguhkan penelusuran perbandingan tentang pengalaman demokratisasi dan perjuangan kebebasan negara-negara lain. Denny menampilkan fakta-fakta historis dari pengalaman yang bervariasi bahwa jalan menuju demokrasi dan kebebasan tidak selalu bergerak mulus (Bab 2). Demokratisasi di Eropa dan Amerika pada awal abad 19, di Amerika Latin era 1980an, atau negara-negara Komunis pada 1990an, menghadapi tantangan yang muncul dari berbagai lapisan struktur sosial, pergulatan sejarah, melekat dalam perjalanan kebangsaannya.

Di sinilah Denny mengajak pembaca untuk memahami bahwa, meskipun prasyarat kultural dan struktural bagi demokrasi telah terpenuhi, tanpa adanya komitmen yang kredibel dari aktor-aktor politik untuk membangun institusi kenegaraan yang membantu tumbuhnya spirit kebebasan, demokrasi akan berbelok arahnya. Fenomena munculnya fasisme Jerman pada Perang Dunia II (h. 49), bangkitnya demokrasi sektarian India (h. 78), dan segegrasi rasial Amerika (h. 55), menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi sering berbuah tragedi.

Tesis Denny seakan menggaungkan kembali para teoritisi politik modern tentang pentingnya menciptakan struktur politik modern yang menjadi fondasi kultural bagi terbentuknya tatanan demokrasi. Bagi kalangan yang akrab dengan teori demokrasi, apa yang digaungkan itu bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi jika

ditempatkan dalam melihat perjalanan berdemokrasi negara-negara Islam, pesan Denny ini terdengar sangat kuat: Struktur sosial politik yang dipenuhi dengan aktor-aktor demokrat akan membentuk budaya demokrasi; bukan sebaliknya.

Di negara mayoritas muslim, tidak cukupnya kelas sosial yang menopang ide-ide kebebasan dan demokrasi menjadi tantangan tersendiri. Di Timur Tengah, misalnya, satu dekade setelah mengalami ketegangan revolusioner sejak Musim Semi Arab 2011, kita patut pesimis demokrasi akan menjadi egenda perubahan di negara-negara itu. Struktur sosial negara Islam tampaknya akan terus menjadi hambatan serius akan sulitnya Dunia Arab menerima demokrasi. Meskipun sejumlah krisis dan gejolak sosial-ekonomi menimpa kawasan ini (bahkan untuk ini sudah berjalan hampir satu abad) pola hidup masyarakat tradisional, dalam bentuk politik Islamisme seperti di Mesir dan Tunisia, atau sektarianisme agama (Irak, Suriah, Lebanon, dan Bahrain) dan tribalisme (Libya, Kuwait dan Yaman), terlihat sangat menonjol dan relevan dalam proses-proses politik untuk menyelesaikan krisis tadi.

Apa yang terjadi pada Musim Semi Arab—berbeda dari analisis yang diajukan oleh media dan akademisi—bukan kisah tentang benturan antara kekuatan demokrasi dan otokrasi, atau antara kekuatan reformasi melawan otoritarianisme. Pergulatan yang sesungguhnya adalah benturan antara kekuatan tradisional melawan orang-orang yang mewakili modernitas, yang pada kedua kubu itu tidak memiliki kultur demokrat sejati. Sejauh kultur demokrasi yang *genuin* ini belum tersemai di kalangan

elite negara-negara tadi, sulit mengharapkan terbangunnya tatanan politik yang bersandar pada cita-cita demokrasi dan menganut prinsip-prinsip keadaban.

Ambil contoh yang terjadi di Mesir. Revolusi sosial sepanjang 2010 hingga 2013, telah memunculkan kelompok politik yang di mata pengamat disebut "liberal, demokrat, dan sekuler". Bahkan dalam konflik melawan Ikhwanul Muslimin, militer juga sering kali dipandang mewakili liberal, meskipun tidak sepenuhnya sekuler. Hal ini keliru: banyak elite dan masyarakat terpelajar Mesir yang dianggap liberal itu masih terbelenggu dalam struktur masyarakat politik yang tradisional.

Sedari awal, pada minggu-minggu pertama setelah Mubarak jatuh, menyadari tidak punya peluang melawan kaum Islamis—khususnya Ikhwan—dalam kompetisi yang adil, kelompok kelas menengah yang liberal berupaya membujuk militer lewat Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), agar menunda pemilu, yang menurut rencana bakal menjadi lembaga yang bertugas menyusun konstitusi baru. Mesir saat itu dalam tahap awal menuju demokrasi. Tetapi kaum liberal lebih menempuh jalan "otoriter" dengan cara mondorong tentara memegang kendali pemerintahan. Hal ini dilakukan karena mereka sadar bahwa kaum liberal tidak akan mengalahkan Ikhwan dalam Pemilu.

Pihak tentara, SCAF, yang masih terikat dalam perjanjian dengan Ikhwan, tidak memedulikan tuntutan kaum liberal dan tetap melangkah mengadakan referendum konstitusi pada Maret

2011. SCAF juga menyelenggarakan pemilu majelis tingkat-rendah Parlemen dari November 2011 hingga Januari 2012, dan akhirnya membuka jalan berlangsungnya pemilihan Majelis Tinggi (Shura Council, setingkat MPR) pada Februari 2012. Terakhir, SCAF tetap bersikeras mengadakan Pemilihan Presiden pada Juni 2012. Di semua proses itu, Islamis mengalahkan lawan-lawan politiknya, dengan pengecualian pada pemilihan presiden, di mana Muhammad Morsi menang dengan selisih tipis: yakni 51,7 persen. Pada tingkat inilah, kelompok liberal-sekuler Mesir yang dibangga-banggakan di Dunia Arab sekalipun, menempuh jalan yang *illiberal*.

Dengan absennya kaum liberal di masa transisi, ada dua kekuatan utama dalam politik Mesir, yang dua-duanya tidak memiliki kultur demokrat sejati. Satu adalah Ikhwanul Muslimin, yang sejauh ini merupakan partai politik terbesar dan paling terorganisir di Mesir. Yang lainnya adalah militer, yang tidak hanya ditopang oleh angkatan bersenjata, tetapi juga menguasaia ekonomi nasional melalui berbagai jaringan usaha konglomerasi. Pada awalnya, tentara berpihak pada Ikhwan, karena tidak ada alasan mencegah mereka. Kalkulasinya adalah sejauh tidak mengganggu preferansi status militer, anggaran, atau pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya, Ikhwan yang di atas angin itu dibiarkan melenggang berkuasa dalam pemerintahan Mesir.

Tetapi dinamika selanjutnya justru berjalan berbalik. Tidak lama setelah memenangkan pemilu, Ikhwan dan para pemimpinnya menjelma menjadi kelompok politik tradisional.

Yaitu ketika Presiden Morsi, melalui cara-cara yang diktator, hendak memaksakan pandangan Islamnya dalam konsitusi nasional. Ikhwan juga hendak memonopoli semua lembaga pemerintahan Mesir, termasuk tentara. Bahkan ketika Morsi—sebagai Presiden dan pejuang demokrat—menunjukkan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan, tetap tidak bersedia kompromi dengan lawan-lawannya. Mesir akhirnya dilanda krisis ekonomi, kekacauan hukum, pembangkangan, dan kegagalan mengendalikan keamanan.

Tampak bahwa, setelah berkuasa, Ikhwanul Muslimin berubah menjadi kelompok yang tidak punya komitmen mengawal transisi secara demokratis. Koalisi anti-Ikhwan pun bergolak, termasuk yang mengaku "liberal", Salafi, Kristen Koptik dan—yang terpenting—tentara. Pada Juni 2013, gerakan anti-Morsi membesar dan menggelar aksi demonstrasi di kota-kota besar Mesir. Dari titik inilah kudeta militer yang dipimpin Jenderal Al-Sisi menemukan momentumya. Didukung oleh gerakan "pembangkangan", kudeta itu berhasil menumbangkan pemerintahan demokratis pertama Mesir. Hingga detik ini, tak seorang pun bisa meramalkan, kapan peluang demokrasi akan datang lagi.

Potret masyarakat muslim di Dunia Arab merupakan pemandangan lazim dari struktur sosial dan konfigurasi elite di Dunia Islam. Politik agama, militer dan sebagian besar dari apa yang disebut "kelas menengah liberal" sebenarnya masih tersandera oleh kultur kehidupan masyarakat yang tidak demokratis.

Model Indonesia?

Bagaimana dengan Indonesia? Di sinilah pesan penting Denny JA mengemuka. Negara dengan penduduk muslim terbesar ini perlahan tapi pasti akan menjadi model politik untuk perjuangan demokrasi Dunia Islam, karena kemampuannya mengatasi tantangan-tantangan struktural untuk mempersiapkan tumbuhnya tatanan sosial politik yang mendukung demokrasi dan kebebasan.

Dewasa ini, Indonesia barangkali merupakan satu-satunya negara mayoritas muslim yang telah bergerak maju merayakan demokrasi dan kebebasan. Bukan saja berhasil mengkonsolidasikan praktik politik demokrasinya, tetapi juga munculnya kekuatan-kekuatan sosial, budaya, pendidikan dan politik yang terus hendak membangun "model politik Islam yang beradab", *daulah madaniyah*; sebuah model yang digaungkan para demokrat muslim era 1980an seperti Cak Nur dan Gus Dur tentang institusi kenegaraan "sekular" tapi memberi ruang nilai-niali agama mengambil peran.

Tetapi sejujurnya, pada poin penting tentang gagasan kebebasan yang dikaitkan dengan spirit agama inilah Denny JA enggan mengelaborasi lebih jauh. Padahal, sejak awalnya, buku ini membuka perbincangan kebebasan yang mengarah pada petuah terkenal yang pernah ditulis seorang sastrawan Prancis abad 19, Victor Hugo: "Jauh lebih kuat dari seribu tentara, adalah ide yang masanya telah tiba". Pada kesempatan inilah saya hendak memperlihatkan, bagaimana ide-ide tentang kebebasan dan demokrasi pada intelektual muslim 1970an

mempunyai kekuatan politik tersendiri untuk menopang pergerakan agenda pembangunan institusi politik reformasi di era 2000an. Kenyataan inilah yang menjadikan Indonesia—untuk membandingkannya dengan Tukri atau Mesir—sebagai model dalam menyelesaikan ketegangan segitiga antara Islam (agama), negara modern, dan kebebasan.

Diperlukan usaha-usaha serius untuk menciptakan ekuilibrium politik di Dunia Islam akan beroperasinya sistem politik-hukum dalam konstitusi yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjamin peran agama di ruang publik. Ini penting karena hanya dengan cara itulah negara-negara mayoritas muslim mampu keluar dari jebakan sekularisme politik, sekaligus menghindarkan diri dari sektarianisme agama. Pelajaran penting tentang sektarianisme demokrasi ini tercermin dari Revolusi Islam Iran 1979. Revolusi yang mulanya mencita-citakan terbangunnya politik demokrasi, akhirnya jatuh melahirkan otoritarianisme baru atas nama agama. Shah Iran adalah penguasa otoriter, tetapi revolusi yang menumbangkannya memproduksi otoritarinisme baru yang berupa pelembagaan otoritas Syiah dan mengubur kembali fondasi sistem demokrasi yang sesungguhnya, yaitu kebebasan. Perjuangan menegakkan demokrasi tidak akan tumbuh sampai muncul sekelompok kaum demokrat dengan karakter yang beraspirasi kebebasan untuk mewujudkannya.

***

Prof. Ali Munhanif, Ph.D

Guru besar di bidang Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pria kelahiran Blora, 12 Desember, 1965 ini, pernah menjadi Kepala Program Studi Ilmu Politik di fakultas tersebut (2011-2015). Pada periode yang sama, ia menjabat Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). Sejak 2019, Ali dipercaya menjadi Dekan FISIP UIN Jakarta. Ali menyelesaikan PhD-nya di Department of Political Science, McGill University, Kanada (2009). Dikenal sebagai penulis masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan, Ali menerbitkan beberapa karyanya di jurnal ilmiah Studia Islamika, "Ties that Would Divide: Explaining NU's Exit from Masyumi in 1952" (2012); "Forms of Cultural Mobilization in Aceh Rebellions" (2015); di al-Jamiah: Journal for Islamic Studies, "Lineages of Islamic Extremism in Egypt: Islam, State Violence and the Origins of Radical Politics" (2018). Saat ini Ali sedang menuntaskan penelitiannya tentang, "Pathways to Democracy: Ideas and Politics in the Making of Muslim Democrats in Egypt, Turkey, and Indonesia".

Kelas Menengah dan Kompleksitas Peran Agama

Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D

Dalam kajian ilmu politik saat ini tengah tumbuh secara substansial perhatian terhadap hubungan antara Islam dan demokrasi. Pertanyaan utama tentang mampukah negeri-negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam menghadapi tantangan politik krusial membuka pintu menuju ufuk baru demokrasi. Sehubungan dengan tren perhatian dunia akademik terhadap Islam dan demokrasi, buku karya Denny JA berjudul *Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia sebagai Model?* ini memiliki beberapa kekuatan yang patut dijadikan sebagai rujukan penting dalam kajian soal Islam dan demokrasi serta demokratisasi di negeri-negeri muslim.

Pertama, bahwa saat menguraikan tentang kemungkinan bagi dunia Islam untuk masuk pada era demokrasi beserta lintasan kemungkinan yang menyertai, Denny tidak terjebak untuk membahas tema pro dan kontra hubungan antara Islam dan demokrasi sebagai sesuatu yang intrinsik dalam dirinya sendiri. Karya ini tidak memilih posisi untuk melakukan kecaman berlebihan dengan menyatakan bahwa Islam secara esensial memiliki corak peradaban yang bertentangan dengan demokrasi maupun masuk pada titik ekstrem lain dengan

melakukan dukungan gegap gempita bahwa Islam secara esensial memiliki nilai-nilai yang menunjang total jalan menuju gerbang demokrasi.

Memang perkembangan di dalam studi ilmu politik sudah bergerak maju untuk melampaui pendekatan yang melihat faktor budaya sebagai faktor yang sudah cukup dalam dirinya sendiri atau faktor esensial untuk menilai apakah wilayah budaya tertentu sejalan atau tidak dengan demokrasi. Dua buku yang sekarang menjadi klasik, karya Samuel P Huntington (1996) *The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order* dan Bernard Lewis (2002) *What Went Wrong*, menjadi contoh dari pendekatan kultural esensialis yang skeptik terhadap optimisme Islam menyambut demokrasi. Meskipun kerapkali digugat, pandangan kultural esensialis ini tanpa disadari diikuti (terutama karya yang lebih *soft* dari Bernard Lewis) oleh studi-studi tentang Islam dan demokrasi, terutama di kalangan mereka yang melihat fenomena fanatisme atau ekstremisme keagamaan sebagai sesuatu yang statis dan secara inheren kedap dari konteks struktural dan sosial di sekitarnya. Karya Denny JA berhasil keluar dari jebakan-jebakan pemahaman esensial sambil tetap berpijak pada harapan yang terukur tentang masa depan negeri-negeri muslim melintasi jalur demokrasi.

Kedua, salah satu sisi menarik dari karya ini, meskipun buku ini terbilang sebagai buku pendek yang ringkas, namun Denny JA tidak mengabaikan pentingnya perluasan wawasan komparatif terkait bagaimana berbagai kawasan (mulai dari Eropa Barat dan Amerika Utara, negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet,

negara-negara Skandinavia, serta negara-negara Asia dan negeri-negeri Kawasan Muslim) memasuki pintu gerbang demokrasi disertai dengan problem dan kesempatan maupun keberhasilan dan kegagalannya. Pembahasan komparatif menjadi penting, sehingga meskipun diuraikan secara ringkas, berbagai kalangan pembaca baik dari pembaca umum maupun *expert* dapat melihat bahwa proses dan praktik demokrasi bukanlah suatu proses yang berlangsung sekejap dalam satu malam.

Dalam penjelasan terkait komparasi berbagai kawasan bagaimana memasuki tatanan politik demokrasi, karya ini juga mengilustrasikan dengan referensi yang baik tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi politik seperti relasi dan pertarungan kelas sosial memiliki kontribusi penting menuju proses demokrasi terutama di negara-negara dengan demokrasi yang sudah matang maupun negara-negara sosialis seperti Rusia dan China. Dalam melihat negara-negara demokrasi mapan kita diajak untuk menyaksikan bagaimana bangkit dan tampilnya kelas borjuasi dan kelas menengah di Inggris dan Amerika Serikat menjadi tulang punggung dari demokrasi, sementara pada konteks Prancis dan Jerman kita melihat bahwa tatanan demokrasi dan kapitalisme tumbuh di bawah topangan dari peran aktif negara dengan kaki-kaki birokrasinya yang kuat yang cukup intervensionis untuk mendorong pembangunan ekonomi serta implikasi politik yang menyertainya. Sementara tidak tumbuhnya kelas menengah dan kaum borjuasi di Rusia dan China menjadi penyebab proses transformasi sosial tidak mengarahkan negeri tersebut menuju pada proses demokrasi. Di sini kita diajak melihat dengan sekilas perjalanan dan trajektori

perubahan politik berdasarkan analisis kekuatan-kekuatan kelas sosial seperti digambarkan oelh Barrington Moore Jr (1966) dalam karya klasiknya *Social Origins of Democracy and Dictatorship*.

Ketiga, bahwa karya ini meskipun tetap konsisten melihat tatanan demokrasi liberal dan relasi agama dan negara yang tidak mengistimewakan satu keyakinan di atas yang lain, tidak melihat trajektori politik *illiberal* maupun demokrasi *illiberal* sebagai kutukan! Tanpa terjebak pada penggambaran hitam-putih tentang kriteria negara demokrasi liberal dan *illiberal*, karya Denny JA (dengan melihat pergumulan yang terjadi di negeri-negeri muslim, negara-negara Asia-Afrika dan juga kasus India) melihat bahwa demokrasi *illiberal* adalah lintasan antara, atau suatu tahapan yang dengan segala persoalan yang ada di dalamnya (mulai dari maraknya politik identitas, problem korupsi, politik diskriminasi) akan membawa suatu negara masuk pada era demokrasi liberal sesuai dengan perjalanan waktu dan pematangan pelembagaan dan kondisi masyarakat yang ada di dalamnya. Dari penjelasan tersebut Denny JA masih bersikap optimis bahwa demokrasi Indonesia dengan berbagai problem *illiberal* yang ada di dalamnya dapat menjadi model bagi perjalanan demokrasi di negara-negara muslim lainnya.

Selanjutnya dengan berbagai kekuatannya, buku singkat yang patut diberi apresiasi untuk menambah wawasan berharga tentang perjalanan demokrasi, memiliki beberapa persoalan yang membutuhkan catatan kritis terhadapnya.

Pertama, karya dari Denny JA ini tidak mampu mempertahankan stamina dalam melakukan analisis tentang demokrasi di berbagai kawasan dengan perspektif analisis politik yang konsisten. Pada satu bagian Denny JA menggunakan pendekatan analisis relasi kelas sosial dalam memahami perkembangan politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat serta Rusia dan China. Tapi di sisi lain, Denny tidak menggunakan analisis yang sama dalam melihat perjalanan demokrasi di negeri-negeri muslim. Problem ini tidak lagi menjadi semata-mata persoalan metodologis, tapi sedikit banyak mengurangi akurasi penjelasan Denny JA dalam melihat prospek demokrasi di negeri-negeri muslim. Apabila kita masukkan analisis relasi kelas sosial dalam melihat prospek demokrasi di negeri-negeri muslim misalnya, kemungkinan Denny akan lebih berhati-hati untuk melihat Indonesia sebagai suatu model. Mengingat bahwa dalam perspektif analisis kelas, dominasi kekuatan oligarki yang merupakan persenyawaan aliansi dari kekuatan bisnis besar yang bergantung dengan kekuatan politik-birokrasi dalam arena politik Indonesia dan lemahnya pengaruh borjuasi independen maupun kelas menengah yang merdeka menjadi bagian dari persoalan utama mengapa Indonesia sulit untuk naik kelas menuju era demokrasi liberal.

Sementara di sisi lain, analisis struktural juga akan membuat kita cermat dan tidak terlalu menggantungkan kepercayaan bahwa capaian demokrasi liberal di negara-negara maju akan terus berjalan di atas angin. Apabila kita menyaksikan perubahan politik terakhir, kita akan menyaksikan krisis demokrasi liberal terkait dengan kemunculan kekuatan

populisme kanan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tampilnya kekuatan populisme kanan yang bercorak rasis, anti-imigran, dan mengabaikan fondasi-fondasi politik liberal tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya rasa frustrasi dari kelas menengah rentan maupun kelas pekerja kulit putih akibat mulai tidak responsifnya saluran politik demokrasi mengawal aspirasi politik mereka di era krisis ekonomi pasca 2008.

Kedua, buku ini juga kurang memberikan ilustrasi terkait kompleksitas peran agama dalam politik baik di negara maju dan berkembang. Seperti diutarakan oleh Kai Hafez (2010) dalam *Radicalism and Political Reform in the Islamic and the Wetern World* bahwa bahkan di negara-negara Eropa yang telah mencapai fase demokrasi matang, kekuatan politik agama yang memiliki corak beragama puritan tampil sebagai kaum reformis baik di Inggris dan Amerika Serikat untuk menjadi unsur penting yang memperkuat demokrasi. Penggambaran politik yang *sophisticated* seperti yang disampaikan oleh Michael Walzer (2015) dalam karyanya *The Parodox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterevolutions* juga dapat menjadi catatan untuk menutupi celah yang tidak disampaikan dalam buku ini, yang dapat diproyeksikan untuk membaca pergumulan politik di negeri-negeri muslim. Hal itu terkait dengan bagaimana kontestasi dan negosiasi antara kaum nasionalis sekuler dan nasionalis relijius berlangsung di negara-negara yang memperoleh kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua seperti Israel, India, dan Aljazair, serta bagaimana *path* relasi tersebut mempengaruhi perjalanan negara-negara tersebut ke depan.

Pada akhrinya buku ini memberikan sumbangan penting dalam perluasan wawasan kajian politik di Indonesia, dan perambahan dalam jalur akademik bagaimana upaya kita untuk mendorong lebih kencang gerbong demokrasi di Indonesia untuk menghormati politik liberal dan inklusif.

***

Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D

Lahir di Jombang 23 November 1976, Pengajar di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya (sejak 2004). Ketua Tim Navigasi Provinsi Jawa Timur. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik S1 pada tahun 2002 di Universitas Airlangga, Gelar Master dalam Ilmu Politik dari Pasca Sarjana UI 2006 dan Gelar Ph.D dari Asia Research Centre Murdoch University pada tahun 2016. Penulis buku The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era.

Hijrah Demokrasi Terganjal Anarki: Tantangan Perubahan Politik di Negara-negara Islam

Drs. Sri Yunanto M.Si, Ph.D

Terobosan Meta-kuantitatif

Hancurnya komunisme pada akhir Perang Dingin (*Cold War*) menimbulkan harapan atau spekulasi di kalangan muslim dan non-muslim, terutama negara-negara yang sudang menganut sistem demokrasi liberal. Mereka berharap kemenangan demokrasi atas komunisme pada Perang Dingin akan memberikan pengaruh atau tetesan demokratisasi kepada Dunia Islam. Saya melihat hadirnya *Buku Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim*: *Indonesia Sebagai Model?* karya Denny JA ini merupakan wakil atau ekstensi dari harapan ini. Kehadiran buku ini tentulah patut mendapatkan apresiasi dan pujian, karena buku ini menambah referensi penting dalam memahami perdebatan dalam kompatibilitas antara Islam dan Demokrasi.

Dari sisi metodologis, buku ini juga tidak kalah menariknya. Sementara kebanyakan buku-buku yang ditulis sebelumnya membahas diskursus hubungan Islam dan demokrasi dari

perspektif teologis dan teoritis, buku ini menggali hubungan keduanya dari koridor empirik yang menggunakakn meta-kuantitaf yang berbasis survei sebagai tulang punggung (*backbone*) analisis. Distingsi ini tidak lepas dari jati diri penulisnya Denny JA yang selama ini dikenal sebagai seorang konsultan survei mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) .

Dengan mentode analisa meta-kuantitatif argumentatif, Denny JA mencoba menggali dinamika demokratisasi yang sudah, sedang, dan terus akan berjalan di negara-negara muslim. Sebagai seorang pakar survei, dalam buku ini Denny JA terlihat piawai merangkai temuan lembaga-lembaga survei raksasa seperti Pew Research Center, Gallup, dan Economist Intelligence Unit untuk mendukung tesisnya dan memberikan harapan terjadinya demokratisasi di dunia Islam.

Kalangan Islam moderat atau liberal dan penganut demokrasi liberal harus bersabar dan menahan diri untuk tidak kecewa dengan temuan survei yang dilakukan *Economic Intelligence Unit* (EIU) yang menjadi *point of departure* analisa buku ini. Survei itu menyimpulkan bahwa dari 50 negara muslim yang di survei tidak ada yang mendapatkan nilai A. Artinya tidak ada negara muslim yang masuk dalam kategori demokrasi yang matang (*full democracy*), hanya 3 negara muslim berada pada posisi setengah matang (*flawed democracy*), 17 negara masih menggunakan rezim campuran (*hybrid*), dan 30 negara atau mayoritas berada pada kasta otoritarianisme, atau level yang paling rendah. Muslim Indonesia yang sudah memutuskan negara ini menggunakan sistem demokrasi (*republic*) sejak

kemerdekaannya boleh berbangga karena berada pada kasta tertinggi *(flowed democrocy)* di antara negara muslim bersama Malaysia dan Tunisia yang berada satu grup tetapi lebih tinggi skornya dari Indonesia. Maka dapat dipahami kalau penulis ini mengusulkan Indonesia sebagai model demokratisasi di negara Islam.

Demokratisasi Terganjal Anarki dan Tribalisme

Benarkah 60 atau 50 negara Islam ini akan bergerak menuju demokratisasi? Apakah tujuan akhir dari demokratisasi yang berproses di negara-negara muslim ini adalah demokrasi liberal? Jika pertanyaan di atas ditanyakan kepada penulis buku ini, maka jawabannya adalah iya. Penulis buku ini meyakinkan bahwa dunia muslim perlu mempertimbangkan hijrah untuk memeluk jalan demokrasi dan kebebasan. Ia meyakini bahwa jalan ini akan membawa kebahagiaan multi dimensional. Pilihan demokratisasi dan kebebasan sebagai keharusan bagi negara yang sudah mampu, walaupun realitasnya fenomena yang masih terjadi di wilayah muslim ini belum mengarah kesana? (hal 27).

Bahkan penulis meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan merupakan *pre-requisite ovenue* untuk mencapai prinsip-prinsip Al-Quran dengan indikator yang dirumuskan oleh Hossein Askari dalam *Islomicity Index*. Sayangnya 20 negara yang menduduki ranking tertinggi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam bukanlah negara Islam. Lagi-lagi kasta tertinggi dipegang

oleh negara-negara Barat. Pertanyaan kita adalah, mengapa bukan negara-negara di Timur Tengah yang mempunyai ranking tinggi dalam penerapkan prinsip-prinsip Islam?

Jika kita tengok fenomena yang terjadi negara-negara Timur Tengah pasca Perang Dingin, justru yang terjadi adalah fenomena yang berlawanan dengan arah demokratisasi. Berakhirnya Perang Dingin membawa dunia Islam terutama di kawasan Timur Tengah kepada situasi anarki dan menjauhkannya dari demokrasi. Anarki itu muncul dalam dua fenomena. *Pertama*, munculnya kaum fundametalis Islam yang menghidupkan kembali politik Islam yang sebagiannya termanifestasi dalam terorisme dengan membawa simbol Islam. Al Qaeda, Islamic State Of Iraq and Syam (ISIS) dan kelompok-kelompok afiliasinya dengan menggunakan nama dan Simbol Islam menggunakan cara-cara teror untuk mencapai tujuan yang mereka anggap Islamis.

Ideologi yang ingin menghancurkan demokrasi ini memberikan dampak ketakutan bukan hanya kepada negara di Timur Tengah dan dunia Islam, tetapi juga kepada masyarakat di dunia. Sekalipun dilakukan oleh sekelompok kecil umat Islam, gema ketakutan yang dimagnifikasi oleh kebebasan media, meyakinkan kepada publik bahwa Islam seakan-akan menjadi musuh demokrasi dan perdamaian. Masyarakat Islam seakan-akan menjauh dari demokrasi.

Kedua, bersamaan dengan aksi terorisme, muncul fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah.

Fenomena ini sebagian berhasil menumbangkan penguasa otoriter seperti Sadam Husein di Irak, Moamar Qaddafi di Libya, dan juga Husni Mubarak di Mesir. Gerakan yang bercampur aduk dengan terorisme ini juga masih berlangsung di Suriah yang harus menyelesaikan negosiasi dengan kelompok pemberontak walaupun ISIS melemah. Arab Spring yang diharapkan menjadi milestone demokratisasi di Timur Tengah justru berubah menjadi anarki. Arab Spring tidak menyentuh kerajaan-kerajaan atau kesultanan kaya di bawah koalisi negara-negara teluk di bawah kepemimpinan Arab Saudi yang selama ini menjadi sekutu Amerika dan Barat.

Selain itu, Arab Spring yang diwarnai dengan kekerasan dan konflik yang akhirnya mengembalikan kekuasaan militer otoriter yang baru seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Dalam *style* yang berbeda juga terjadi di Turki dibawah Recep Tayyib Erdogan. Di luar itu konflik dan kekerasan juga masih berlangsung di Yaman antara kelompok Mansur Hadi yang didukung Arab Saudi dan Kelompok Houti yang secara diam-diam didukung Iran.

Kompleksitas Socio Historis

Di sebagian negara Islam demokrasi memang telah diadopsi menjadi sistem politik, sementara di negara-negara Timur Tengah demokrasi tampaknya menjadi barang baru karena negara-negara ini dibangun di atas fondasi kesukuan (*ashabiyah* atau tribalisme) yang jauh dari budaya demokrasi. Kompleksitas

socio historis ini kemudian melahirkan heteroginitas sistem politik. Sebagian besar negara-negara Islam di Timur Tengah berbentuk kerajaan *(mamlakah)* atau kesultanan (*sulthaniah*), sebagian berbentuk republik (*jumhuriyah*), Iran dengan mazhab Shiahnya mengambil bentuk keimaman teokratis (*imamah*). Heterogintias ini memengaruhi derajat demokratisasi negara-negara itu. Buku ini memang tidak mengkaji secara mendalam tentang kompleksitas latar belakang socio historis dan heteroginitas sistem politiknya yang bisa jadi akan lebih menjelaskan derajat penerimaan negara-negara itu terhadap demokrasi dan liberalisasi.

Akankah Mimpi Demokratisasi di Negara-negara Islam Menjadi Kenyataan?

Negara-negara Islam yang mempunyai sistem politik yang heterogen itu memang tidak bisa diletakkan dalam satu keranjang analisis. Negara-negara yang sudah menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara di Afrika akan mempunyai potensi meningkatnya demokratiasi yang lebih besar. Kelas menengah di negara-negara ini sebagaimana diyakini oleh penulis buku ini akan memainkan peran yang penting dan motor terjadinya demokratisasi dan liberalisasi.

Tetapi harapan akan terjadinya gelombang demokratisasi dan liberalisasi tampaknya lebih sulit diharapkan menjadi kenyataan di negara-negara Islam yang mempunyai sistem kerajaan,

kesultanan konservatif tetapi dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Selain Brunei, sebagian negara-negara kerajaan atau kesultanan itu berada di wilayah Timur Tengah. Kerajaan dan kesultanan ini tidak mengalami guncangan-guncangan yang berarti yang menuntut perubahan mendasar dalam sistem politiknya selama terjadinya Arab Spring. Di negara-negara itu, rakyat termasuk kelas menengah sudah masuk dalam "*comfort zone*" dan mungkin tidak memerlukan demokrasi dan liberalisasi. Selain itu peran negara yang otoriter dan kuat berhasil mempertahankan tingkat kesejahteraan dan menekan setiap embrio yang menginginkan perubahan politik yang membahayakan kekuasan elite penguasa yang juga didukung oleh Amerika dan Barat.

Dalam aspek tertentu negara-negara ini hampir mirip dengan China dan Singapura, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat dan kuatnya negara tidak membuka kesempatan munculnya gerakan yang akan melakukan perubahan yang besar dan mendasar dalam sistem politik. Kerajaan-kerajaan kaya di Timur Tengah bukanlah Imperium Uni Soviet yang secara damai dan senyap melakukan demokratisasi yang kemudian membubarkan salah satu adi daya pada masa Perang Dingin itu. Kompleksitas historis dan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan menjadi faktor utama perbedaan tersebut.

Budaya politik yang bertumpu pada tribalisme dan kompleksitas socio historis menyebabkan negara-negara ini terkunci dalam kekerasan dan potensi konflik baru. Demokratisasi yang mensyaratkan perdamaian, negosiasi dan konsensus masih

dihantui oleh ketegangan dan konflik. Rivalitas antara negara yang mayoritas berpendudk Sunni dan Shiah yang dimotori oleh Arab Saudi dan Iran yang perang *proxy*-nya berlangsung di Yaman, persoalan bangsa Kurdi yang masih berjuang menuntut hak-hak politiknya di Turki, Irak, Suriah, dan Iran adalah agenda yang menjadi tantangan demokratisasi di Timur Tengah. Namun demikian, para pejuang demokrasi liberal memang tidak boleh putus asa. Optimisme akan meluasnya demokratisasi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam harus terus dihidupkan, sebagaimana secara provokatif argumentatif dikobarkan oleh Denny JA, penulis buku ini.

Bekasi, 30 Maret 2020

***

Drs. Sri Yunanto M.Si, Ph.D

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dosen Pascasarjana Studi Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategi dan Global (SKSG), Universitas Indonesia (UI)

Dunia Muslim Hijrah ke Demokrasi Liberal?

Moch Nur Ichwan, Ph.D

Sejumlah survei internasional dalam beberapa dekade terakhir menempatkan negara-negara muslim di ranking buncit dalam hal demokrasi, ekonomi, dan kebahagiaan. Artinya negara-negara muslim itu sebagian besar tidak demokratis, ekonominya jeblok, dan tidak bahagia. Bahkan, yang mengherankan, mereka juga masuk dalam urutan belakang dalam indeks keislamian (*Islamicity*). Habis sudah kalau begini. Untung saja, dalam hal demokrasi, sebagaimana dilaporkan oleh Economist Unit Index pada 2019, masih agak lumayan: ada tiga negara (dari 50 negara muslim yang ada datanya), yakni Tunisia, Malaysia, dan Indonesia, yang mampu menembus peringkat demokrasi setengah matang (*flowed democracy*), satu level di bawah demokrasi matang (*full democracy*).

Tapi tentu survei-survei itu mengecewakan. Seburuk itukah negara-negara muslim? Yang menjadi masalah adalah Pew Research Center, sebuah lembaga survei yang berbasis di Amerika, mengestimasi pada 2015 bahwa pada penduduk muslim akan menjadi penduduk terbesar di seluruh dunia pada 2050, dengan rincian muslim 73%, Kristen (Protestan dan Katolik) 35%, Hindu 34, Yahudi 16%, dan selebihnya agama-

agama lain dan *unaffiliated*. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, umat dan negara muslim macam apa yang ada pada tahun 2070 itu? Apakah negara-negara muslim itu nanti maju dalam hal demokrasi dan kebebasan, atau justru lebih parah? Pertanyaan ini wajar karena dengan jumlah yang besar itu mereka diasumsikan dapat mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Kecuali jika mereka seperti buih di lautan.

Melihat hal di atas, dalam bukunya yang ambisius, *Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model?*, Denny JA mengusulkan tiga hal. *Pertama*, "hijrah massal" negara-negara muslim kepada demokrasi dan kebebasan. Menurutnya itu bukan hanya "mungkin", tetapi juga "harus" dilakukan. *Kedua*, Indonesia sebagai model negara muslim yang mendasarkan diri pada demokrasi liberal. *Ketiga*, hijrah itu melalui rute "demokrasi *illiberal*" sebagai terminal pertamanya.

Di sini muncul pertanyaan, mengapa demokrasi liberal? Mengapa Indonesia sebagai model? Dan mengapa rute demokrasi *illiberal*? Selain pertanyaan-pertanyaan itu, sembari bersepakat dengan Denny JA terkait dengan demokrasi dan kebebasan, mungkinkah mengandaikan demokrasi liberal alternatif? Saya akan membaca buku Denny JA ini dengan pendekatan "*multiple modernities*" (Eisenstadt 2002) dan "*multiple democracies*" (Blokker 2008) yang dengan mempertimbangkan aspek budaya politik mengandaikan tidak tunggalnya jalan modernitas dan demokrasi, dan memungkinkan penggalian nilai-nilai "liberal" dalam Islam dan masyarakat muslim pada satu sisi dan sintesis

tertentu komunitarianisme dan liberalisme.

Hijrah Demokrasi Liberal dan Rute *Illiberal*

Denny JA berargumen bahwa untuk menjadi negara-negara muslim yang maju dan berkualitas, maka hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, yakni, jalan demokrasi dan kebebasan. Dan itupun hanya ada satu model, yakni model Barat, terutama Eropa (Barat) dan Amerika, walau rute-nya bisa saja agak memutar. Tujuan utamanya sama: Demokrasi Liberal ala Barat.

Ini terkesan kuat ketika dia membahas di Bab II tentang demokrasi di dunia lain. Dalam bab ini dia membahas tentang sejarah demokrasi di berbagai belahan dunia. Dia mengawalinya dengan pembahasan tentang demokrasi di Inggris dan di koloninya, Amerika, sebagai cikal-bakal demokrasi dan kebebasan itu. Kelas borjuis--yang kemudian menjadi kelas menengah--di Inggris, dapat melepaskan diri dari cengkeraman monarki diktatorial dan feodalisme. Kelas menengah borjuis ini pula yang memelopori kemerdekaan Amerika Serikat dari cengkeraman tuan-tuan tanah aristokrat kolonis Inggris. "Dari sini jalan menuju demokrasi liberal konstitusional Amerika dimulai," katanya. Kelas borjuis ini lah kelas menengah yang melahirkan kapitalisme yang menjadi pilar demokrasi dan kebebasan itu.

Saat membahas negara-negara selain Inggris dan Amerika, Denny JA menunjukkan kelemahan mereka. Jerman, misalnya,

dikatakannya sebagai "menikmati demokrasi, tapi mengkhianati kebebasan" dengan melihat kasus Hitler dan Nazi. Ketika membahas Prancis dia menyebutnya "negara terlalu dominan, dan kebebasan menjadi anak tiri" dengan melihat kasus Napoleon Bonaparte. Saat membicarakan tentang Rusia, China, dan negara-negara non-Barat (seperti Mesir dan Saudi), dia menyebut di sana "tak tumbuh kelas menengah, tak tumbuh kebebasan". Denny JA juga membahas Rusia yang disandingkan dengan negara-negara Amerika Latin, dan menyebut mereka mengalami "sindrom orang kuat, ilusi atas nama rakyat." Ketika membahas negara-negara Asia dan Afrika, dia mengasosiasikan mereka dengan "tumbuhnya demokrasi tanpa kebebasan."

Untuk menuju demokrasi liberal itu, Denny JA menyarankan negara-negara muslim mengambil rute demokrasi *illiberal* sebagai terminal awal. Denny JA memandang bahwa transisi menuju demokrasi di banyak Dunia Muslim disebutnya tidak '*happy ending*'. Ketika kran demokrasi dibuka, "sekali dibiarkan partai bebas bertarung, yang menang sangat mungkin justru partai yang anti-demokrasi." Saat partai yang menang berkuasa melalui pemilu ia menghalangi pemilu bebas berikutnya. *Arab Spring* pun gagal melahirkan negara-negara demokratis, kecuali Tunisia. Rezim otoritarian justru menguat dibanyak negara Arab.

Pertanyaannya, mengapa tidak disarankan memilih rute menunda demokrasi, tetapi memperkuat ekonomi kapitalistik, seperti yang dilakukan Mexico, China, dan Singapura? Padahal untuk menciptakan kelas menengah yang kuat, yang merupakan prasyarat demokrasi liberal itu, sebagaimana yang Denny tunjukkan, rute ini

terbukti cukup sukses.

Indonesia sebagai Model?

Denny JA mengusulkan Indonesia sebagai model demokrasi bagi Dunia Islam. Sebelumnya, beberapa ilmuwan dan politisi dunia juga mengusulkan hal serupa, seperti Fazlur Rahman, Paul Wolfowitz, James B. Hosterey, Abhishek Mohanty, dan bahkan PM Inggris David Cameron. Padahal dari segi demokrasi, Indonesia sampai pada tahap demokrasi *illiberal*. Demikian pula, berdasarkan Economist Unit Index, ranking Indonesia pada 2019 jauh di bawah Malaysia dan Tunisia. Malaysia ranking 43 (skor 7.16), Tunisia ranking 53 (skor 6.72), dan Indonesia ranking 64 (skor 6.48). Mengapa tidak Malaysia, atau setidaknya Tunisia? Paling tidak ada tiga alasan mengapa Indonesia dia nobatkan sebagai model. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. *Kedua*, Indonesia berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilihan umum yang damai. *Ketiga*, Indonesia mempunyai budaya politik yang kuat tak ingin menjadi negara agama.

Hal lain, walau tidak disebut secara eksplisit, Indonesia mempunyai ciri-ciri negara demokrasi, seperti kekuasaan kehakiman yang independen, pemilu multipartai, hak pilih universal, kontrol sipil terhadap kekuasaan militer dan polisi, hak dan kebebasan berserikat dan beribadah, kelas menengah yang luas, dan ekonomi kapitalistik yang berkembang. Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, selain Tunisia dan

Malaysia, tingkat demokrasi Indonesia masih lebih tinggi.

Secara budaya, Indonesia memeluk komunitarianisme, yang dalam istilah lokal disebut budaya kekeluargaan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang supraplural, baik dari segi etnis, bahasa, agama, maupun kepercayaan, dan mereka dapat bersatu menjadi Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah negara spiritual-religius, bukan hanya penduduknya mayoritas beragama resmi, tetapi juga banyak keyakinan (*belief*) lokal di berbagai daerah. Kearifan lokal juga banyak mendukung nilai-nilai demokrasi--walau ada pula yang bertentangan. Indonesia juga mempunyai budaya yang moderat dan harmonis.

Indonesia haruslah dilihat sebagai warisan budaya yang plural, bukan tunggal. Ada warisan budaya Hindu-Buddha-India, Islam-Arab, Kristen-Eropa-Barat, dan agama dan keyakinan pribumi. Ini semua membentuk kultur yang moderat dan menghormati perbedaan. Radikalisme keagamaan dianggap unsur asing yang menyusup di dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia juga muncul tradisi intelektual Islam yang cukup terbuka. Muncul pemikiran-pemikiran yang beragam, dari tradisionalis, liberal progresif, revivalis, moderat, radikal, dan militan--tergantung bagaimana Anda mengklasifikasikannya. Muncul gerakan muslim liberal dan progresif, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Pos-Tradisionalisme Islam, dan sebagianya. Muncul pula gerakan Islamis transnasional dalam sekitar tiga dekade terakhir, seperti Ahmadi (Ahmadiyah), Ikhwani (Ikhwan

Muslimin), Salafi (Salafi-Wahabi), Tahriri (Hizb al-Tarhir), dan Tablighi (Jamaah Tabligh), di samping gerakan Islamis lokal, seperti Jemaah Islamiyah, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jammah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorud Daulah (JAD--berafiliasi ke ISIS), dan gerakan-gerakan lokal lainnya.

Sebagaimana masyarakat muslim lain, demokratisasi seringkali dimaknai sebagai "konfesionalisasi" atau religionisasi. Ini yang kita saksikan pasca-Orde Baru. Islamisasi perundang-undangan dan hukum, menguatnya politik identitas dan populisme. Melihat Indonesia sebagai alternatif bagi Dunia Muslim dalam hal demokrasi dan kebebasan harus mempertimbangkan semua aspek itu, termasuk budaya politiknya.

Pendekatan *Multiple Modernities*, *Multiple Democracies* dan Sintesis Etika Politik

Mengharapkan negara-negara muslim berhijrah menuju demokrasi liberal tentu tidak mudah, karena mereka mempunyai budaya politik yang beragam, yang berbeda dengan budaya politik di pusat demokrasi liberal, yakni Eropa Barat dan Amerika. Di wilayah yang secara umum disebut "pusat" (*center*) Dunia Islam, seperti Afrika Utara, Turki, wilayah-wilayah Persia (Iran, Irak), Saudi Arabia, Yaman, dan Syria budaya politik mereka tidaklah tunggal. Apalagi wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*) Dunia Islam. Budaya politik Afrika, Asia tengah, Asia Selatan, Asia Tengara tidaklah sama. Namun, dapatlah dikatakan bahwa

mereka berbagi budaya politik "komunitarian", sebagaimana Jepang, Korea Selatan, China, India, Singapura. Bagi mereka, komunitas lebih penting daripada individu. Sementara budaya politik negara-negara Barat lebih bersifat "individualis" di mana individu lebih penting daripada komunitas. Negara-negara Barat lebih mudah memasuki liberalisme karena tuntutan mereka adalah hak-hak individu. Sementara negara-negara muslim, dan negara-negara Timur lainnya, lebih mempertimbangkan komunitas dan "common good", kebaikan bersama.

Faktanya, meskipun sejumlah negara Timur yang komunitarian mampu menjadi negara yang maju, negara-negara muslim masih tertinggal. Ini mesti ada *something wrong*. Etika profetik, yang juga diterapkan oleh muslim Abad Pertengahan, belajar kepada siapa saja, meskipun kepada China, Yunani, India, Romawi, dan Persia, yang saat itu tentu saja non-Muslim. Kita harus keluar dari apa yang disebut A. Gutmann sebagai "*tyrannies of dualism*", *thaghut* dualisme, dalam hal ini dualisme komunitarianisme dan liberalisme. Selama ini dua etika politik ini diangap saling menegasikan satu sama lain. Pilihannya adalah either/or, kalau tidak ini maka itu. *Thaghut* dualisme ini mesti diakhiri.

Kajian demokratisasi secara umum mendukung pandangan liberal tentang demokrasi dan budaya politik, dan hanya ada satu jalan menuju demokrasi, yakni jalan Barat, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Untuk menjadi negara demokrasi, maka harus belajar kepada Barat. Menarik untuk mempertimbangkan gagasan tentang "*multiple modernities*" (Eisenstadt 2002) dan "*multiple democracies*" (Blokker 2008),

yang mengandaikan kemungkinan rute lain menuju modernitas dan demokrasi. Jepang, Korea Selatan, China, misalnya, dapat mencapai modernitas dan demokrasi dengan cara mereka sendiri. Saya kira lebih menarik untuk mengarahkan negara-negara muslim ke pendekatan ini secara simultan. Menggeser sama sekali komunitarianisme adalah seperti menanam pohon di bebatuan, bisa tumbuh tetapi kemungkinannya kecil, dan kalau pun tumbuh tak normal. Di sini dimungkinkan sintensis antara komunitarianisme dan liberalisme. Kalau kita lihat, negara-negara Timur lain tersebut mampu menyinkronkan antara nilai-nilai komunitas dan individual, baik dengan menggali nilai-nilai budayanya sendiri, seperti Jepang, maupun dengan mengadopsi nilai-nilai tertentu dari liberalisme, terutama etika hak-hak dasar.

Dari sini diharapkan muncul modernitas dan demokrasi Dunia Islam yang berangkat dari sejarah, budaya, nilai-nilai dan religiositasnya sendiri, namun terbuka, kosmopolit dan berorientasi pada masa depan. Dalam konteks ini mungkin dikembangkan demokrasi liberal alternatif, yang melihat demokrasi dan kebebasan bukan dalam kacamata liberalisme, namun dalam kacamata Islam Indonesia, Islam Eropa, Islam Turki, dan seterusnya, yang dalam satu sisi mempertimbangkan nilai-nilai profetik keislaman, budaya politik, dan etika hak-hak dasar. Dalam konteks Abad Pos-Sekular (Habermas 2003), demokrasi liberal pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.

Etiko-Teologi Politik dan Ekonomi

Denny yang mengatakan bahwa diskusi dan perdebatan apakah Islam *compatible* dengan demokrasi dan kebebasan adalah upaya yang sia-sia saja, karena itu bergerak pada wilayah interpretasi. Dalam interpretasi didapati kelompok yang mendukung bahwa Islam sejalan dengan demokrasi, dan ada kelompok yang menolaknya. Ada pun di tengah-tengah itu ada kelompok moderat yang berupaya menengahinya. Ini menurutnya *useless* karena "tak akan memberi kepastian apa pun" dan "apa yang terjadi pada dunia nyata bukan semata produk sebuah interpretasi agama, tapi juga hasil pertarungan nyata kekuatan sosial, politik dan ekonomi." Saya setuju dalam hal pertarungan kekuatan sosial, politik dan ekonomi ini, tetapi tidak dengan pentingnya pemikiran Islam yang konstruktif bagi *multiple modernities* dan *multiple democracies*.

Bagi negara muslim, tidak mungkin peran agama diabaikan. Namun, memang masih ada persoalan etis-teologis yang harus diatasi dalam konteks politik Dunia Islam. Saat etika Protestan dapat menjadi spirit kapitalisme di Barat; etika Katolik menjadi spirit modernitas di Itali, Perancis, Polandia, Spanyol, Filipina; etika Konfusian menjadi spirit kemajuan di China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang; bagaimana dengan etika Islam? Pentingnya etika dalam membangun sebuah negara sebenarnya tercermin di dalam literatur filsafat dan etika politik Islam, tetapi masih lebih menekankan etika personal pemimpin politik, raja, atau sultan. Belum merupakan etika dalam lembaga dan sistem

politik. Ada kegamangan teori politik Islam saat memasuki negara bangsa. Saat berbicara tentang politik Islam masih merujuk kepada *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*-nya al-Mawardi atau *al-Siyasah al-Syar'iyyah*-nya Ibn Taimiyyah, padahal keduanya ditulis dalam konteks daulah Islamiyah, bukan negara bangsa modern.

Tapi memang, sebagaimana dikhawatirkan Denny, kecenderungan tirani mayoritas yang mengatasnamakan agama biasanya tinggi dalam masyarakat beragama, sebagaimana yang dilihatnya dalam kasus India. Demikian pula, ada pilihan sulit bagi rezim di negara-negara muslim antara memilih politik otoriter atau fundamentalisme agama. Ini merujuk kepada sikap politik Mesir dan Palestina. Husni Mubarak bilang bahwa jika Mesir mengambil jalur demokrasi, maka kelompok fundamentalis Islam akan mengambil alih negara. Juga Yasser Arafat, yang mengatakan jika dia menempuh jalan damai dengan Israel, pemerintah akan digulingkan Al-Fatah dan Hamas. Itu semua karena formulasi posisi Islam dalam politik belum ditemukan secara pas.

Menurut saya sejumlah cendekiawan kita sudah menemukan rumusan yang lebih kurang sesuai. Nurcholish Majid, Abdurrahman Wahid, dan Syafii Maarif, misalnya, telah mengusulkan pentingnya nilai-nilai Islam, seperti keadilan, cinta, kerja keras, dan sebagainya, sebagai etika politik. Bagaimana Islam menjadi prinsip etik dalam politik, ekonomi, kebudayaan. Proyek peradaban ini belum selesai, meskipun tokoh-tokoh pengusungnya sebagian sudah meninggalkan kita.

Pemikiran mereka perlu terus digali dan dikembangkan secara lebih sistematis lagi, bukannya makin tumbang dan layu. Ide yang bagus itu harus diterjemahkan secara empiris agar dapat bertahan, berkembang, dan memenangkan kontestasi real dalam lanskap sosial, budaya, politik dan juga ekonomi Indonesia dan Dunia Muslim. Ia memerlukan infrastruktur sosial, politik, dan ekonomi agar dapat berbunga dan berbuah. Menjadikan Indonesia sebagai model harus mempertimbangkan dengan serius aspek intelektual ini.

Tantangan terberat lain adalah dalam bidang ekonomi. Bagaimana etika Islam menjadi spirit dalam ekonomi, sebagaimana etika Protestan menjadi spirit bagi kapitalisme. Kegagalan muslim dalam membangun politik dan demokrasi yang sehat adalah karena ia gagal diterjemahkan dalam tataran ekonomi. Ekonomi syariah yang berkembang selama ini, yang juga melahirkan kapitalisme Islam, mungkin perlu dilihat sebagai peluang dan tantangan. Perkembangannya secara internasional makin lama makin menjanjikan. Seiring dengan itu, kajian etika dan *maqosid* (tujuan-tujuan syariah: melindungi jiwa, akal, agama, ekonomi dan keturunan) dengan kecenderungan progresif dalam ekonomi dan bisnis makin maju dari waktu ke waktu. Ini mestinya akan melahirkan ekonomi syariah yang lebih progresif yang bukan hanya berorientasi kesejahteraan ke dalam umat Islam tetapi juga keluar. Jika perkembangannya demikian, maka **saya yakin ini akan** mampu melahirkan modernitas dan demokrasi alternatif yang mampu menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan *performance* negara-negara muslim secara internasional.

Memang, negara-negara muslim berada di persimpangan jalan. Saya juga membayangkan apa yang dibayangkan oleh Denny JA tentang negara muslim mendasarkan diri pada demokrasi dan kebebasan. Tapi saya membayangkannya dalam konteks *multiple modernities* dan *multiple democracies* yang memungkinkan penggalian nilai-nilai "liberal" dalam khazanah Islam pada satu sisi dan sintesis komunitarianisme dan liberalisme pada sisi lain. Demokrasi di negara-negara muslim tidak bisa dicangkokkan begitu saja dari luar tanpa mempertimbangkan kekayaan historis, kultural, religius, dan intelektual mereka. Indonesia sebagai model bukan karena demokrasi *illiberal*nya, tetapi karena pengalaman hidupnya dalam keragaman budaya, agama, etnis, pemikiran, serta pengalaman beragama, berbudaya, berpolitik, dan berpikir--walau belum tentu dalam berekonomi. Akhirul kalam, demokrasi liberal telah membawa dunia Barat kepada kemajuan mereka dalam berbagai bidang. Problemnya adalah apakah dunia muslim perlu mengikuti jejaknya begitu saja, yang tampaknya semakin lama semakin tak terkejar, ataukah membuat rute alternatif menuju negara muslim berdasarkan demokrasi liberalnya sendiri? Saya kira pembuatan rute alternatif ini bukan saja "mungkin" tetapi juga "harus".

Wallahu a'lam.

Yogyakarta, 3 April 2020

***

Moch Nur Ichwan, Ph.D

Dosen tetap dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Gelar PhD-nya diperoleh dari Tilburg University dan MA dari Leiden University. Penelitiannya dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan ulama dan politik, politik syariah di Aceh, religious governance, dan hermeneutika Islam.

Islam Indonesia:
Role Model bagi Dunia Islam

Dr. Muhamad Syauqillah

Buku Denny JA bertajuk *Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model?* pada halaman 2 mengutip Economist Inteligence Unit yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada kluster 'demokrasi setengah matang,' dan uniknya skor Indonesia (6,48), berada di bawah Tunisia (6,72), angka yang menurut saya agak sedikit mengherankan, mengingat permufakatan kelompok nasionalis dan sekuler dalam pembahasan konstitusi secara intesif baru terjadi pada masa setelah Musim Semi Arab (Arab Spring) 2011. Sistem demokrasi yang dianut oleh Tunisia pun ternyata masih menyisakan kerapuhan secara ekonomi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya berkisar pada 1-3 persen selama tiga tahun terakhir. Berbeda dengan Indonesia, pemufakatan berbagai kelompok ideologis telah ada sejak kemerdekaan, dan dalam satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rata-rata 5 persen.

Lalu apakah Indonesia layak disebut sebagai model demokrasi di dunia Islam, padahal skor menurut Economist Inteligence Unit berada pada demokrasi setengah matang? Kategorisasi seperti ini menarik apabila disandingkan dengan fakta kesejarahan,

bahwa setidaknya Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi dengan kebudayaan lain. Hal ini adalah fakta yang sangat penting mengingat dibutuhkannya dialog kebudayaan dalam konteks demokrasi.

Ada beberapa pengalaman sejarah yang bisa kita uraikan, yang merefleksikan tentang karakter masyarakat Indonesia yang terbuka *(open minded)*, antara lain; *Pertama*, sejak Islam masuk ke Indonesia dan hingga saat ini menjadi agama mayoritas, selain karena keberhasilan metode penyebaran ajaran agama (dakwah), kemaampuan menerima hal baru (ajaran) oleh masyarakat nusantara adalah faktor lain penentu keberhasilannya. *Kedua*, selaras dengan penyebaran Islam di Nusantara, pencarian khazanah pengetahuan keislaman juga terjadi sejak berabad silam. Santri nusantara sudah belajar ke Mekah dan Madinah pada abad ke-17. Bahkan pola pendidikan Islam di nusantara diinspirasi dan dipengaruhi juga oleh model pendidikan Islam dari Timur Tengah, sebut saja Madrasah Nizamiyah, Khanqahs (tempat sufi), yang dalam tradisi Usmani dikenal *medrese*, *tekke* dan *honne*.

Ketiga, ekspedisi pengetahuan masyarakat nusantara. Warga Indonesia juga menjadikan Barat sebagai negara tujuan belajar. Oei Jan Lee asal Banda Neira, Gondowinoto dan Soeroso kakak beradik, sebelumnya ada beberapa nama seperti Marcus de Royn (putra raja Kielang), Andrea de Castro, Laurens de Fretis dan Lauren Queljo, termasuk Raden Saleh. Mohammad Hatta pada kisaran tahun 1921-1932, salah satu tokoh proklamasi juga pergi ke Belanda guna menempuh pendidikannya, sekaligus

mengatur strategi melawan kolonialisme.

Keempat, kontribusi sejarah. Abad 20 menjadi masa kelam Usmani karena kekuasaannya harus jatuh di masa itu. Kegagalannya memproyeksi kegemilangan kekuasaan melalui era Tanzimat (reformasi) pada abad ke 19 dan kekalahan Perang Dunia I, memaksa Usmani melepaskan sejumlah wilayah kekuasaannya, termasuk wilayah Hijaz. Disintegrasi wilayah-wilayah koloni Usmani tak terelakkan. Koalisi Bani Saud bersama Wahabi (kelompok yang melakukan pemberontakan di Nejad pada era Usmani), mendirikan sebuah kerajaan, Arab Saudi. Imbasnya, Raja memberlakukan aturan berdasarkan ideologi Wahabi. Salah satu amar putusannya adalah meniadakan makam Nabi Muhammad. Melihat situasi Hijaz ini, para ulama nusantara bermusyarawarah, lalu diutuslah KH. Wahab Chasbullah untuk melobi Raja Arab Saudi dengan nama delegasi diplomatik 'Komite Hijaz.' Lobi berhasil dan hingga saat ini makam Nabi Muhammad masih bisa didatangi peziarah dari berbagai dunia.

Kelima, kemampuan Indonesia dalam melakukan sintesa produk peradaban lain. *Tesvir Efkar*, majalah Usmani yang didirikan oleh Ibrahim Sinasi pada 1862, menginspirasi KH. Wahab Chasbullah mendirikan *Toshwirul Afkar*, pada perkembangannya menjadi organisasi Nahdlatul Ulama. Selain *Teşvir Efkar*, terdapat *Al Manar*, jurnal yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridho pada 1898. Majalah ini berisi tentang gagasan pembaharuan Islam dan modernisasi di dunia Islam, majalah ini bersirkulasi hingga ke Indonesia, maka tidak heran jika gagasan *Al Manar*

berpengaruh pada Perserikatan Muhammadiyah. Interaksi yang bukan hanya sekedar interaksi semata, tetapi memberikan pengaruh pula pada pola gerakan sosial di Indonesia.

Keenam, sebagaimana halnya KH. Wahab Chasbullah melakukan sintesa peradaban, Sukarno dalam sejarah pembentukan negara Republik Indonesia, juga mengambil inspirasi Mustafa Kemal Ataturk (lihat buku *Di Bawah Bendera Revolusi*) yang menjadikan *Altı İlke* (enam prinsip-Republikan, Nasionalisme, Kerakyatan, Sekularisme, Kenegaraan dan Revolusioner) sebagai basis pijakan negara bangsa pasca Usmani. Jika Republik Turki menggunakan *Altı İlke*, di Indonesia pasca kolonialisme, Sukarno menawarkan Pancasila (lima prinsip), rumusan ideologi berbangsa berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.

Indonesia dan Turki: Perbandingan Politik

Perjalanan sejarah Republik Turki dalam konteks demokrasi, memiliki dinamika tersendiri. Sistem multi partai baru dimulai sejak tahun 1946. Sebelumnya, partai politik hanya tunggal, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi, partai yang berpedoman pada doktrin Ataturk. Sistem multipartai membuat CHP harus merelakan kekuasaan dominasinya terbagi ke dalam beberapa partai politik. Ini berbeda dengan Indonesia yang telah mengenal sistem multipartai persis di masa pasca kemerdekaan. Pemilu tahun 1955 telah diikuti 36 partai politik. Agak berbeda, saat Indonesia dipimpin Orde Baru, di mana fusi partai politik hanya

menyisakan 3 partai politik, dan era reformasi kembali dalam praktik sebelumnya, lebih dari 3 partai politik.

Ada dua hal yang menarik menilik sistem kepartaian dan pemilu di Turki; *Pertama*, sistem kepartaian dan pemilu memiliki ambang batas parlemen sebesar 10 persen, jauh dibandingkan Indonesia yang hanya 4 persen. Hal ini berdampak pada stabilitas politik di parlemen dan peta koalisi dan oposisi pemerintahan. Berbeda dengan Indonesia, di mana terdapat koalisi pelangi.

Kedua, kekuatan oposisi. Saat ini kubu oposisi utama adalah Partai Rakyat Republik (CHP-Partai berhaluan Kemalisme), dengan koalisi partai penguasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Sejak 2002 AKP berkuasa, CHP setia pada haluan oposisi. Pemandangan berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, sejarah politik pasca reformasi di Indonesia, partai politik silih berganti memegang kekuasaan, tidak ada satu partai pun bersedia menjadi oposisi sejati (permanen) di luar pemerintahan. Sebagai contohnya adalah Partai Gerindra dan PKS. Gerindra pasca Pemilu 2019, bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo, dan PKS, sebelum 2014 ikut menjadi bagian pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, namun saat ini menjadi oposisi kritis pemerintahan Jokowi. Konstalasi politik yang demikian menyehatkan bagi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan *check and balances*.

Sirkulasi elite di Turki bukan hanya menggunakan mekanisme pemilu, beberapa kali terjadi kudeta-uji coba kudeta juga pernah terjadi di Era Usmani, Jennisari berusaha mengambil

kekuasaan Sultan Abdul Azis pada abad 19. Sepanjang sejarah Republik Turki, kudeta tercatat terjadi pada tahun 1960, 1970, 1980, 1997 dan terakhir percobaan kudeta militer terjadi di tahun 2016. Sebagaimana juga Turki, Indonesia memiliki sejarah kelam, pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Proses transfer kekuasaan dari Sukarno ke Suharto berlangsung secara tidak normal, tidak menggunakan pemilu.

Dari sisi pelembagaan infrastuktur politik, Turki telah mengubah sistem pemerintahannya dari parlementer ke presidensial melalui referendum pada 2017, setelah sebelumnya yakni pada 2014 menggelar pemilihan presiden secara langsung. Sistem presidensial Turki memberikan kewenangan luas bagi Presiden sebagai eksekutif pemerintahan. Sebelum diberlakukannya Sistem Presidensial di sana, salah satu lembaga *think tank*, yang berafiliasi dengan Erdogan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu rujukan studi menyoal implementasi sistem presidensial.

Selain dinamika politik, partai politik dan pelembagaan infrastruktur politik, Turki dan Indonesia juga diwarnai dengan isu *self determination*, Indonesia berhasil melokalisir masalah Aceh sebagai masalah internal pasca Tsunami Aceh dengan perjanjian damai Helsinki. Demokrasi Indonesia diramaikan oleh partai lokal dan pemberlakuan hukum Islam di Aceh. Namun sayangnya, jika kita melihat isu *self determination* di Turki, konflik Turki dengan Partai Pekerja Kurdi (PKK) masih belum usai hingga saat ini, kendati upaya damai (Barış Süreci-masa damai) pernah diupayakan pada 2013.

Surplus Demokrasi Indonesia

Meminjam istilah Alfred Stepan, Indonesia telah berhasil mempraktikkan apa yang disebut dengan *twin toleration*, di mana agama dan negara dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi tanpa harus menegasikan antara satu dengan lainnya. Indonesia, sejak awal berdiri sebagai negara, tidak mengesampingkan peran agama dalam negara. Berbanding terbalik dengan Turki yang sama sekali memisahkan urusan agama dengan urusan negara (sekularisme). Meski hari ini telah berubah, dari sebelumnya bercorak *laicite ala franca*, dua dekade terakhir, Turki mengubah langgam sekularismenya, dari aktif sekularisme menjadi pasif sekularisme. Betapapun demikian, Turki memiliki catatan demokrasi saat ini, di mana kekuasaan terpusat pada Erdogan dan keterlibatan keluarganya di pemerintahan serta isu Fetullah Gulen dan pengikutnya yang diduga terlibat dalam percobaan kudeta 2016.

Finally, mengacu pada penjabaran fakta di atas, Indonesia dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi role model demokrasi di dunia muslim. Tak berlebihan jika kelak Indonesia dijadikan rujukan oleh negara-negara muslim dunia, terkhusus untuk demokrasi dan kebebasan. Sisi pengalaman dan sejarah masa lalu Indonesia sebagai entitas, telah dengan jelas menunjukkan kemampuan Indonesia berikut rakyatnya dalam beradaptasi dan mensintesakan peradaban lain. Kemapanan institusi politik Indonesia juga menjadi hal yang tak kalah penting sebagai faktor penunjang kelayakan Indonesia menjadi model dunia

muslim. *At last*, Indonesia telah berhasil memosisikan dirinya sebagai aset dalam pembangunan negara dan bangsa, dan itu artinya Indonesia telah sukses menjawab pertanyaan klasik namun sulit dijawab, yaitu bersandingnya negara dan agama .

***

Muhamad Syauqillah

Doktor Alumni Ilmu Politik pada Universitas Marmara Istanbul Turki, lulusan tahun 2016 ini adalah alumni Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia dan juga Alumni Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini selain menjadi dosen tetap Kajian Timur Tengah dan Islam, Syauqi begitu sapaan akrabnya, merupakan Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Tantangan Indonesia sebagai Negara Muslim Demokrasi

Prof. Dr. Lili Romli

Pengantar

Buku Denny yang berjudul *Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model?*, patut mendapat apresiasi, meski memang dalam pembahasan tentang peta jalan tentang demokrasi dan kebebasan untuk dunia muslim belum banyak dielaborasi. Sebab secara *defacto* dan *dejure*, mayoritas dunia muslim masih berkubang dalam sistem otoritarian dan monarki absolut, yang juga sudah disampaikan oleh penulis sendiri.

Belum lagi, yang juga dipaparkan, bahwa *Arab Spring*, yang semula dapat menggulingkan rezim otoriter, dalam perkembangannya musim semi demokrasi tidak berjalan ke arah pemerintahan demokratis, alih-alih kembali ke sistem semula (otoriter), hanya Tunisia yang berhasil menegakkan demokrasi. Penulis buku ini tidak panjang lebar mengelaborasi, bisa jadi, mungkin sebagai pancingan bagi pembaca lain untuk lebih jauh memetakan jalan demokrasi dan kebebasan bagai dunia muslim.

Terlepas dari itu, buku Denny JA ini, yang diakui sebagai provokatif, merupakan gagasan yang *genuine* karena berani dan dengan penuh optimisme menyatakan bahwa negara-negara muslim akan bergerak ke arah negara-negara demokrasi. Padahal sebagaimana diketahui, seperti dijelaskan dalam buku ini, berdasarkan *Democracy Index 2019,* dari 50 negara muslim yang diteliti tidak ada satu pun yang *Full Democracy*, sebaliknya mayoritas negara muslim masuk dalam kategori tidak demokratis/otoriter (30 negara), 17 negara masuk kategori Rezim Campuran (*Hybrid Regimes*), dan hanya 3 negara yang masuk kategori *Flowed Democracy* (demokrasi cacat atau belum matang), yaitu: Malaysia, Tunisia, dan Indonesia.

Optimisme ini perlu mendapat dukungan karena ia menepis pendapat Samuel P Huntington, Bernad Lewis, dan Ellie Kedourie. Ketiga sarjana ini tidak percaya akan adanya demokrasi di dunia muslim karena Islam bertentangan dengan demokrasi. Mereka mengatakan bahwa semakin kuat Islam dalam suatu masyarakat, demokrasi semakin tidak mungkin dapat dijumpai pada masyarakat tersebut (Mujani, 2007; 313). Sebaliknya, seperti dikatakan oleh Huntington, budaya yang cocok untuk demokrasi adalah budaya Barat: demokrasi modern bermula di Barat, dan sejak awal abad ke 19, bagian terbesar negeri demokratis adalah negeri-negeri Barat (Huntington, 1995; 386). Atas dasar itu tidak heran bila salah satu faktor yang mendorong lahirnya demokrasi, ia memasukkan agama Protestan sebagai faktor.

Meskipun demikian, Denny JA berpendapat bahwa pada

waktunya mayoritas 50 negara muslim akan hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Menurutnya, gelombang besar peradaban bekerja lebih kuat dari rezim mana pun. Perjalanan menuju demokrasi dan kebebasan tetap akan terjadi meski berjalan secara bertahap. Tentang tahap menuju demokrasi ini, Huntington (1995; 47) menyebutkan bahwa ada banyak faktor suatu negara akan menuju demokrasi, yaitu:

* Tingkat kemakmuran ekonomi secara menyeluruh tinggi;
* Distribusi pendapatan dan/atau kekayaan yang relatif merata;
* Ekonomi pasar;
* Perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat;
* Aristokrasi feodal pada suatu ketika dalam sejarah masyarakat;
* Tiadanya feodalisme dalam masyarakat;
* Borjuasi yang kuat;
* Kelas menengah yang kuat;
* Tingkat melek huruf dan pendidikan yang tinggi;
* Budaya yang bersifat instrumental ketimbang idealis;
* Protestantisme;
* Pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat;
* Berkembangnya kompetisi politik sebelum perluasan partisipasi politik;
* Struktur kewenangan demokratis di dalam kelompok-

kelompok sosial;

* Tingkat tindak kekerasan oleh sipil yang rendah;
* Tingkat polarisasi dan ekstremisme politik yang rendah;
* Pemimpin-pemimpin politik yang mendukung demokrasi dengan sepenuh hati;
* Pendudukan oleh suatu kekuatan asing yang pro-demokrasi;
* Pengaruh dari suatu kekuatan asing yang pro-demokrasi;
* Tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu;
* Hasrat kelompok elite meniru bangsa-bangsa yang demokratis; dan
* Heteregonitas komunal (etnis, rasial, keagamaan) [2]

Meski Huntington menyebutkan banyak faktor, untuk kasus di negara-negara muslim, gelombang demokrasi itu diharapkan oleh Denny seperti terjadi di Uni Soviet dan Blok Eropa Timur, di mana faktor pemimpin yang menentukan ke arah jalan demokrasi dan kebebasan tersebut, yang dipelopori Mikhail Gorbachev dengan *Perestroika* dan *Glasnost*. Berkat kepeloporan Gorbachev tersebut, Denny menulis:

> "Lihatlah Uni Soviet dan Blok Eropa Timur. Tahun 1946 sampai 1989an itu wilayah komunisme. Jika kita melihat data kawasan itu di tahun 1970, misalnya, tentu hal yang mustahil membicarakan kemungkinan di kawasan itu beroperasi sistem politik dan ekonomi di

[2] Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafitipers, 1995, hal. 47.

> luar komunisme.
>
> Tapi lihatlah sekarang. Di kawasan itu, 29 negara sedang hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Kecepatan hijrah tentu berbeda-beda antar negara"

Denny mengatakan bahwa dengan terjadi demokratisasi di negara-negara muslim tersebut merupakan gelombang keempat. Ia mengatakan, "Kita sedang menunggu gelombang keempat demokrasi dan kebebasan. Gelombang pertama dimulai oleh Inggris dan Amerika di abad 18-20. Gelombang kedua meluas setelah Perang Dunia II. Gelombang ketiga ketika melanda kawasan Komunisme Soviet dan Eropa Timur. Gelombang keempat ialah ketika melanda 50 negara muslim".

Optimisme Denny terhadap gelombang demokrasi keempat yang nanti melanda negara-negara muslim perlu kita sambut dengan gembira. Karena memang negara muslim sebagaimana yang diperlihatkan oleh *Democracy Index*, yang dikutip dalam buku ini di mana sebagian besar masih otoriter dan bahkan 10 negara muslim lainnya tidak masuk dalam *Democracy Index*, suatu saat akan menuju ke arah demokrasi dan kebebasan. Namun demikian, terhadap optimisme tersebut, tulisan ini mencoba memaparkan beberapa tantangan terkiait demokratisasi dan kebebasan di negara-negera muslim, khususnya Indonesia, yang menurut Denny akan menjadi model demokrasi bagi dunia muslim.

Kelebihan Demokrasi

Dalam tulisannya Denny mengatakan mengapa ia memilih demokrasi bagi negara muslim, bukan sistem yang lain. Meski ada kekuarangannya, menurutnya dibanding sistem politik lain, demokrasi plus kebebasan terbukti dengan data lebih memajukan warga negara dengan seluruh dimensi. Hasil berbagai riset, menurutnya, menunjukkan korelasi positif antara demokrasi, kebebasan, dan kebahagiaan warga negara.

Memang seperti dikemukan oleh beberapa ahli, demokrasi memiliki sejumlah kelebihan atau keunggulan. Robert A Dahl, misalnya, mengemukakan ada l0 hal keunggulan dari demokrasi dibandingkan dengan sistem lain yang tidak demokratis, yaitu (l) Menghindari tirani; (2) Hak-hak asasi; (3) Kebebasan umum; (4) Menentukan nasib sendiri; (5) Otonomi moral; (6) Perkembangan manusia; (7) Menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) Persamaan politik; (9) Mencari perdamaian; dan (l0) Kemakmuran (Dahl, 2001).

Leslie Lipson, dalam bukunya *The Democratic Civilization*, mencatat ada tiga argumen kuat yang membuat orang setuju terhadap demokrasi. *Pertama*, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mengklaim menjunjung tinggi martabat manusia. *Kedua*, mendorong terus menerus pendidikan kewarganegaraan *(civic education)*. *Ketiga*, pendidikan tersebut membantu manusia agar lebih beradab (Lipson, 1964).

Meski ada sejumlah kelebihan dari demokrasi tersebut, dalam

implementasi terdapat sejumlah distorsi, sehingga kemudian sebagian orang sangsi terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Seperti yang dicontohkan oleh Denny dalam bukunya ini, di Indonesia misalnya, demokrasi bajak oleh sejumlah elite. Begitu juga dengan praktik demokrasi di negara-negara lain, sehingga tidak heran bila ada yang berkeberatan terhadap demokrasi.

Menurut Lipson (1964), ada tiga keberatan utama terhadap bentuk pemerintahan demokrasi. *Pertama*, tirani mayoritas. Yang dimaksud dengan tirani adalah perlakuan brutal terhadap sejumlah kecil orang oleh sejumlah besar orang dan penolakan terhadap hak-hak minoritas atau apa yang diyakini oleh minoritas sebagai hak-hak mereka. Meski setiap tipe pemerintahan memerlukan kekuasaan dan kekuasaan dapat disalahgunakan, oleh minoritas, juga oleh mayoritas.

Kedua, bahwa demokrasi menempatkan orang yang bodoh di dalam kekuasaan. Padahal pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat, tetapi harus memiliki keahlian dan seni di dalam memerintah. Orang yang pintar itu memiliki kemampuan dan teknik-teknik memerintah. Harus juga selalu diingat bahwa secara alami hanya sedikit yang bisa memerintah dan massa harus bersedia dipimpin.

Ketiga, demokrasi adalah sebuah ilusi yang terbaik dan kebohongan yang jelek. Demokrasi di mana rakyat yang berkuasa adalah tidak mungkin. Rakyat tidak pernah berkuasa, bahkan tidak juga mayoritas, dan yang sebenarnya hanya beberapa saja yang memerintah. Pemerintahan yang bercirikan

oligarki. Demokrasi adalah dalih yang membantu untuk menyembunyikan dan melindungi beberapa orang. Oleh karena itu demokrasi hanyalah sebuah mimpi.

Islam dan Demokrasi

Dalam Islam, persoalan hubungan agama dan negara, termasuk di dalamnya hubungan Islam dan demokrasi, belum satu suara dan seragam dan satu pendapat. Masing-masing pemikir memberikan interpretasi dan pandangan yang berbeda terhadap hubungan agama dan negara, Islam dan demokrasi. Persoalan ini sudah menjadi perdebatan yang lama dan panjang, yang sampai kini belum berakhir. Menurut Effendy, perbedaan itu terjadi karena memang dalam memandang sumber utama ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadis) tidak bersifat monolitik, tetapi multi-interpretatif. Munculnya berbagai interpretasi dan penafsiran atas teks sumber utama ajaran Islam tentu dipengaruhi oleh faktor waktu dan lingkungan yang bersifat teologis, historis, dan sosiologis. Akibatnya timbul berbagai interpretasi yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan satu sama lainnya. (Effendy, 1995).

Dalam konteks itu, para pemikir Islam menafsirkan hubungan antara agama dan negara juga berbeda-beda. Paling tidak, ada tiga pandangan tentang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, yaitu: *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*); *Kedua*, paradigma yang menyatakan

bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*); dan *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*). (Syamsuddin, 1993).

Begitu juga terkait hubungan antara Islam dan Demokrasi. Seperti yang ditulis oleh Esposito dan Piscatori dalam artikelnya, *"Democratization and Islam"* yang diterbitkan *Middle East Journal* (45, No. 3., 1991) terdapat tiga corak pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi. *Pertama*, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep syura, ijtihad, dan ijmak merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kelompok ini mengatakan bahwa antara demokrasi dan Islam itu sama, baik dalam prinsip maupun prosedur.

Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Kelompok yang menolak demokrasi menyatakan bahwa demokrasi tidak bisa dipadukan dengan Islam, bahkan ia merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Islam sudah cukup sempurna, untuk itu tidak perlu legislasi lain. Jika dalam demokrasi, kedaulatan rakyat bersifat mutlak maka dalam Islam kedaulatan mereka dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim dan antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu diakui

bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Bagi kelompok ini, Islam dan demokrasi memang ada kemiripan dalam prinsip-prinsipnya, misalnya, keadilan, persamaan, musyawarah. Akan tetapi keduanya berbeda dalam soal kedaulatan rakyat. Terma ini dikenal dengan *theodemocracy* yang diperkenalkan oleh Abul A'la al-Maududi (Esposito dan John O Vol, 1998).

Dalam buku ini Denny mengatakan bahwa pertanyaan apakah Islam dan demokrasi itu sesuai atau tidak? Apakah ajaran Islam dan nilai dasar demokrasi itu *compatible*? adalah "pertanyaan yang sia-sia karena Islam sebagaimana agama lain, dan konsep besar lain adalah wilayah interpretasi. Selalu tersedia interpretasi dari ujung kiri, tengah hingga ujung kanan." Sati sisi saya sependapat dengan Denny bahwa itu wilayah interpretasi, tetapi persoalannya interpretasi-interpretasi yang berbeda-beda tersebut di kalangan Islam banyak pengikutnya, tidak seperti di dalam agama Kristen, di mana persoalan interpretasi itu sudah selesai dan final.

Saya sendiri berpendapat bahwa Islam dan demokrasi, bukan hanya kompatibel tetapi suatu keharusan bagi negara-negara muslim untuk mengimplementasikan dan menerapkan demokrasi serta kebebasan. Karena merujuk kepada pendapat Fahmi Huwaidi, dalam bukunya *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani,* demokrasi dekat dan sejalan dengan Islam. Beberapa konsep dan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, menunjukkan hal tersebut. Islam mengendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, penolakan terhadap

kediktatoran, dan dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti diungkapkan dalam al-Quran, agar mereka tidak menyembunyikan persaksiannya, bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu (Kamil, 2002).

Begitu juga dengan pemikir-pemikir lain seperti Soroush yang mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara Islam dan kebebasan—yang terkandung dalam demokrasi. Islam dan demokrasi tidak hanya sejalan, tetapi juga hubungan keduanya tak dapat dielakkan. Ia membela demokrasi untuk dunia Islam bersandar pada dua pilar. Pertama, untuk menjadi mukmin sejati seseseorang harus bebas. Kebebasan ini merupakan dasar dari demokrasi. Demokrasi Islam tidak dapat dibentuk dari atas. Demokrasi hanya diakui jika dipilih oleh mayoritas rakyat, meliputi kaum mukmin dan non-muslim (Wright dalam Sirry, 2002).

Al-Ghannouchi berpendapat bahwa demokrasi Islam awalnya merupakan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Islam tidak datang dengan membawa program khusus berkenaan dengan hidup kita. Islam membawa prinsip-prinsip umum. Kewajiban kita untuk membentuk program/sistem nilai melalui persentuhan antara prinsip Islam dan modernitas. Nilai-nilai demokrasi dari keberagaman politik dan toleransi secara sempurna cocok dengan Islam. Demokrasi Islam merupakan hasil pengalaman manusia belakangan. Kekuatan hukum negara Islam kontemporer berdasar pada kebebasan. Tidak ada tempat untuk membuat perbedaan antar warga, dan hak-

hak persamaan merupakan dasar bagi masyarakat muslim baru manapun (Wright dalam Sirry, 2002).

Begitu juga dengan para pemikir Islam di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Masykuri Abdillah dalam buku "*Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*". Para intelektual muslim Indonesia mengatakan bahwa dalam Islam terkandung prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti *syura'* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al-muawah* (persamaan) dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ada dalam wilayah ijtihad (Abdillah, 1999: 307).

Di antara pemikir dan aktivis muslim yang paling gigih memperjuangkan demokrasi adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bagi Gus Dur, demokrasi merupakan manifestasi terbaik dari nilai-nilai luhur agama yang diyakininya. Dan dalam sistem demokrasi dimungkinkan umat dari berbagai agama, kepercayaan dan suku bisa bersatu untuk mewujudkan tujuan nasionalnya serta melindungi hak-hak asasinya. Dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.

Tantangan Demokrasi di Indonesia

Dalam bab yang lain Denny mengajukan preposisi bahwa Indonesia layak menjadi model, bukan saja karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilu (pemilihan umum) yang damai, tetapi juga tumbuh kultur politik yang kuat tak ingin menjadi negara agama. Lebih lanjut ia menulis beberapa alasan mengapa Indonesia layak sebagai model demokrasi di dunia muslim. Di bawah ini saya kutip langsung pernyataan Denny secara panjang lebar, yaitu:

> "Pertama: di Indonesia, tidak terjadi kasus "*One Man, One Vote, One Time*". Sejak reformasi tahun 1998, sudah berlangsung pemilu yang relatif aman berkali-kali. Pertama kali pemilu yang benar-benar bebas era reformasi di tahun 1999, lalu berlanjut setiap lima tahun: 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Tak hanya pemilu legislatif yang berjalan teratur. Bahkan presiden juga dipilih langsung, dan sudah berkali-kali: 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dalam semua pemilu, relatif situasi politik terkendali. Tak pernah ada kasus pemenang pemilu ingin menghentikan pemilu berikutnya. Tak juga terekam pemenang pemilu ingin merusak kualitas pemilu berikutnya agar semakin tidak kompetitif, dan semakin tidak bebas.
>
> Kedua: di Indonesia, perubahan kekuasaan terbukti bisa berlangsung dengan damai. Pemilu adalah temuan peradaban modern di mana rakyat yang menentukan siapa yang mereka inginkan untuk berkuasa. Peralihan

kekuasaan selalu mungkin terjadi pada setiap pemilu. Di Indonesia sudah terjadi pergantian kekuasaan berkali-kali sejak reformasi. Awalnya yang berkuasa Partai Golkar dengan Presiden Habibie. Kemudian beralih ke Presiden Gus Dur dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Beralih lagi ke Presiden Megawati dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Beralih lagi ke Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari Demokrat. Kini beralih ke Jokowi dari PDIP. Tes sebuah stabilitas demokrasi memang pada perubahan kekuasaan itu. Di Indonesia, *turn over* kekuasaan itu berjalan lancar dan efektif.

Ketiga: di Indonesia, sungguh pun mayoritas penduduknya muslim, partai yang acap kali menang pemilu justru bukan partai yang berbasiskan agama. Yang selalu menang justru partai dengan platform keberagaman: PDIP, Golkar, Demokrat dan PDIP lagi. Sejak pemilu reformasi, banyak partai lahir dan tumbuh. Sebagian mengusung simbol politik Islam. Bahkan pernah pula tumbuh partai yang mengkampanyekan akan menerapkan Syariat Islam"

Optimisme Denny bahwa Indonesia sebagai model demokrasi di dunia muslim perlu mendapat apresiasi dan dukungan, karena bukan saja seperti dikatakan Denny di atas sebagai penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi juga saya cermati bahwa seperti di dalam penelitian Saiful Mujani bahwa Islam mendorong para penganutnya untuk aktif dalam politik demokratis (Mujani, 2007). Begitu juga dengan studi Hefner tentang Islam melalui organisasi Islam terbesar di Indonesia

(NU dan Muhammadiyah) sebagai kekuatan *civil Islam* yang menopang demokrasi di Indonesia (Hefner, 2001).

Akan tetapi perkembangan yang muncul belakangan ini juga menjadi tantangan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari sisi eksternal, dalam arti dari kekuatan non-Islam, demokrasi di Indonesia dibajak oleh para elite sehingga muncul politik dinasti di beberapa daerah dan juga oligarki politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan terhadap implementasi demokrasi itu sendiri. Belum lagi ketika implementasi demokrasi itu diwujudkan dalam pemilihan umum (legislatif dan pemilihan presiden) dan pemilihan kepala daerah, yang muncul adalah sikap pragmatisme di kalangan elite politik dan maraknya *money politics* dalam setiap pesta demokrasi tersebut.

Sementara itu tantangan dari kalangan Islam Indonesia itu sendiri, apa yang dikatakan oleh Bruinessen sebagai *conservative turn*, kembali ke arah konservatif. Menurut Bruinessen, di dalam arus utama Islam (NU dan Muhammadiyah) di mana pandangan modernis dan liberal yang selama ini mendapat dukungan cukup luas kini kian ditolak. Tanda paling jelas terjadinya *conservative turn* dapat dilihat dari sejumlah fatwa kontroversial yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama bertentangan dengan Islam (Bruinessen, 2014: 28)

Kontroversi yang lain ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa ucapan Ahok (Basuki Tjahya Purnama, Gubernur DKI Jakarta)

masuk ke dalam kategori penistaan agama dalam Pidatonya di Kepulauan Seribu. Fatwa MUI ditanda tangani oleh Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin dan Sekjen MUI, Dr. H. Anwar Abbas. Ada pun isi fatwa tersebut sebagai berikut (Detik.com, 2018):

1. *Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.*
2. *Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.*
3. *Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.*
4. *Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.*
5. *Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.*

Dengan keluarnya fatwa MUI tersebut, lalu organisasi Islam yang dikoordinasi oleh FPI dan GNPF-MUI melaku-kan aksi demonstrasi pada hari Jumat 14 oktober 2016, yang menuntut pihak kepolisian untuk memproses laporan terkait Ahok. Kelompok-kelompok Islam ini merasa tidak puas dan

menganggap proses hukum lambat sehingga terkesan dilindungi oleh kekuasaan. Kemudian, aksi demo Aksi Bela Islam kembali digelar kedua kalinya pada 4 november 2016 yang bertajuk Aksi Bela Islam II (411) yang menuntut polri untuk menangkap Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Perkembangan kemudian muncul kembali aksi lanjutan yang diberi nama Aksi Bela Islam III yang lebih dikenal sebagai aksi damai 212. Aksi tersebut berpusat di Silang Monas dan meluber hingga ke Tugu Tani, kawasan Kwitang, Bundaran HI sampai Jalan Thamrin.

Secara sosiologis, peristiwa 212 merupakan gejala menguatnya konversatisme atau Islamisme di Indonesia. Greg Fealy mengatakan bahwa peristiwa 212 menandakan kemenangan Islam garis keras di Indonesia. Hal ini dikarenakan motor penggerak dari aksi damai 212 tersebut adalah kelompok Islam yang terkenal keras seperti FPI (Front Pembela Islam) dengan tokohnya, Habib Rizieq Shihab. Bahkan menurut Rosidi, memang dalam Aksi Bela Islam 212 ada berbagai kelompok, tetapi salah satu kelompok, yakni FPI dan HTI memiliki agenda tersendiri. Mereka memanfaatkan aksi ini sebagai alat atau saluran untuk agenda Islamisasi yang lebih luas. Mereka sejak lama bercita-cita mengusung Islamisasi Negara atau menerapkan Syariat Islam di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia (Rosidi, 2016).

Gerakan Radikal

Tantangan lain bagi demokarasi Indonesia yang mesti diatasi adalah munculnya politik identitas. Seperti dikatakan Maarif, sejak 11 tahun terakhir era reformasi ini munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana *portner* mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat (Maarif, 2012; 21).

Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Kelompok-kelompok radikal ini, dengan kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zhahiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah. Al-Qardhawi menulis (Maarif, 2012; 25):

> Orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat

dengan mereka, tetapi melakukan hal-hal lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid'ahkan, memfasikkan, dan sampai mengafirkan mereka. Dasar bagi orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah "tuduhan." Padahal, menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah, "benar" (tidak bersalah). Inilah hal yang ditegaskan oleh Syari'ah Islam. Namun dasar bagi mereka adalah, tertuduh (bersalah) hingga terbukti.

Sementara menurut Musdah, jika kita menengok ke Tanah Air, yang digawangi oleh kelompok fundamentalis, telah melahirkan tiga bentuk kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh. *Kedua*, kekerasan simbolik, yang dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang bernada melecehkan suatu agama. *Ketiga*, kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri (Musdah, 2012; 45-46).

Di kalangan umat Islam Indonesia fundamentalisme agama cenderung menguat. Gelombang Islam transnasional yang membawa paham-paham radikal membuat kelompok-kelompok Islam fundamentalis semakin mengukuhkan dirinya. Mereka tak segan-segan melakukan berbagai manuver untuk "menyingkirkan" semua kelompok yang dianggap berbeda. Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin

Indonesia, dan beberapa kelompok sejenis termasuk ke dalam faktor penyebab ini. Dukungan MUI atas gerakan ini semakin memperparah situasi, dengan melahirkan berbagai fatwa yang mendiskreditkan beberapa kelompok yang menurut mereka "menyimpang", hingga berujung berbagai kasus kekerasan (Musdah, 2015; 46-47).

Menurut Jones, pendukung gerakan radikal ternyata berasal dari masyarakat madani (*civil society*). Menurutnya, di Indonesia, tidak bisa bicara masyarakat madani tanpa memasukkan kelompok-kelompok Islam yang mendukung formalisasi syariat Islam dan berniat menggantikan sistem demokrasi dengan pemerintahan Islam. Tujuannya bisa sangat sempit dan diskriminatif; doktrinnya bisa eksklusif, dan untuk beberapa, taktiknya bisa termasuk penggunaan kekerasan. Kunci untuk mempertimbangkan kelompok-kelompok ini sebagai masyarakat madani adalah apakah mereka melihat diri mereka sebagai jembatan antara warga negara dan negara, dan sebagian besar memang begitu (Jones, 2015; 7).

Ada tiga jenis kelompok garis keras yang berkembang di Indonesia yang anti demokrasi: *pertama*, kelompok main hakim sendiri, dan FPI adalah yang paling terkenal dalam kategori ini; *kedua*, kelompok advokasi di tingkat akar-rumput, bisa diwakili oleh GARIS (Gerakan Reformis Islam), sebuah organisasi akar-rumput yang cukup kaya di Cianjur dan dipimpin oleh Haji Chep Hernawan yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan; dan *ketiga*, kelompok transformatif yang diwakili oleh Hizbut Tahrir, yang ingin menggantikan sistem demokratik di Indonesia

dengan khilafah (Jones, 2015; 8).

Azca mengajukan tiga varian utama gerakan Islam radikal yakni *pertama*, varian saleh; *kedua*, varian jihadis; *ketiga*, varian politik. Varian saleh lebih berorientasi kepada aktivisme pembangunan 'moralitas individu', mereka sangat *concern* dengan kegiatan-kegiatan dakwah seperti pendidikan dan kajian-kajian keislaman. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah FKAWJ, Salafi, dan gerakan Tarbiyah. Aktivis gerakan Islam radikal Jihadis menyetujui penggunaaan metode kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan gerakannya. JAT, JI, dan DI adalah anggotanya. Sedangkan aktivis Islam radikal politik adalah varian yang paling intensif terlibat dalam proses advokasi agenda gerakan mereka dalam ruang publik, sebagian dari mereka adalah PKS, PPP, PBB, HTI dan FPI (Azca, 2015; 56).

Perda Syariah dan Intoleransi Agama

Selain itu, pasca era reformasi, ketika diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, di beberapa daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariat Islam, sehingga kerap disebut sebagai Perda Syariah. Sejak tahun 1998 sudah terdapat 443 Perda Syariah yang diterapkan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, paling tidak ada empat macam atau jenis yang muncul. Pertama, perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, seprti perda anti pelacuran, perzinaan atau anti kemaksiatan. Kedua, perda yang terkait dengan fashion dan mode pakaian lainnya

seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Ketiga, perda yang terkait dengan "keterampilan bergama". Seperti keharusan bica baca tuluis al-Quran. Keempat, perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui perda zakat, infak dan shadaqah (Suadey, 2007, 27-28).

Meski demikian, dalam pembuatan perda syariah tersebut terselip juga kepentingan elite-elite politik dalam kaitan dengan politik elektoral. Michael Buehler, dalam wawancara dengan BBC Indonesia (21 Febriari 2017) mengatakan,

> "Penerapan Perda Syariah di Indonesia tidak terlalu menjadi pertanda dari pergeseran/transformasi ideologis yang meluas dalam masyarakat Indonesia. Namun lebih sebagai hasil dari politik pemanfaatan. Politisi yang butuh mobilisasi warga dalam konteks pemilihan umum kini mengandalkan kelompok-kelompok yang mendorong penerapan Perda Syariah. Politisi yang sebenarnya menerapkan perda itu bukanlah pegiat Islamis. Saya juga meragukan mereka (politisi) benar-benar yakin pada Perda Syariah atau mengetahui banyak tentang itu. Politisi Indonesia yang menerapkan perda seperti itu, dengan kata lain, adalah Islamis oportunis".

Dalam era reformasi ini muncul juga kasus-kasus intoleransi agama, yang pada umumnya didominasi oleh kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian, pembatasan berpikir dan berkeyakinan, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan aktivitas/ritual keagamaan,

pemaksaan keyakinan, dan konflik tempat ibadah. Sedangkan bentuk tindakan intoleransi yang paling banyak adalah penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu; penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah; penolakan pendirian rumah ibadah; tuntutan penegakan syariat Islam; pengusiran, pemberhentian kerja, pelarangan kegiatan mirip agama lain, dan pemukulan.

Sejak era reformasi aksi-aksi kekerasan atas nama agama terus meningkat, dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Kasus-kasus pengeboman, pengrusakan tempat ibadah, pembubaran acara keagamaan dari kelompok yang dianggap sesat, sampai pada *sweeping* tempat-tempat hiburan dan warung makan yang buka pada bulan Ramadhan, merupakan beberapa contoh yang menjadi pemandangan yang biasa akhir-akhir ini. Aksi main hakim sendiri yang umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras itu di satu sisi menunjukkan adanya degradasi kultur politik bangsa secara umum. Di sisi lain, kekerasan atas nama agama (Islam) juga menjadi fakta degradasi kultur di kalangan sebagian umat Islam sendiri.

Gejala intoleransi agama secara nyata bisa dilihat sebagai penggunaan agama untuk kepentingan politik. Politisasi agama atau instrumentalisasi ajaran agama untuk kepentingan politik kerap digunakan dalam pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Politisasi agama muncul karena adanya pencampuradukan antara wilayah agama dan

wilayah politik. Salah satu bentuk politisasi agama terkait dengan pemilihan calon kepala daerah atau presiden yang non-muslim. Sejumlah ulama, misalnya, menyatakan bahwa pemimpin yang korup masih bisa diperbaiki, sementara yang kafir sulit untuk diubah karena menyangkut akidah dan hidayah Tuhan. Mereka meyakini benar bahwa seorang pemimpin non-muslim selalu dan selamanya akan merugikan, menghambat dakwah dan perkembangan Islam.

Catatan Penutup

Dalam kaitan dengan demokrasi di dunia muslim, termasuk di Indonesia, saya kira gagasan agar sebangun seperti demokrasi di negara-negara Barat, yang disebutnya sebagai demokrasi liberal, perlu menjadi cacatan. Denny dalam buku ini menulis,

> Terminal pertama yang akan dicapai oleh hijrah massal Dunia Muslim adalah demokrasi minus liberalisme. Ialah sistem politik dan ekonomi yang melaksanakan pemilu (pemilihan umum), tapi dengan sistem kebebasan terbatas.
>
> Kultur kebebasan, yang sepenuhnya menjamin hak asasi manusia, tentu tak bisa diharap langsung tumbuh di kawasan ini. Demokrasi minus liberalisme adalah titik kompromi awal Dunia Muslim dan Dunia Barat.
>
> Misalnya, hak kaum LGBT (Lebian, Gay, Bisexual, Transgender) untuk menikah dan disahkan negara. Kultur liberal ini tentu sulit diharap disahkan oleh

negara muslim. Setidaknya itu tak akan terjadi pada tahap awal hijrah menuju demokrasi pada dekade 2020.

Saya kira gagasan untuk menerapkan demokrasi *copy paste* seperti di negara-negara Barat, yang disebutnya sebagai demokrasi liberal, dan jika tidak seperti itu dianggap demokrasi tidak liberal (*illiberal*), banyak intelektual muslim dan tokoh muslim tidak sependapat. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bahtiar Effendy, di mana harus meletakkan demokrasi dalam konteks budaya di mana kita berada. Proyek kontekstualisasi demokrasi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi merupakan konsep politik yang berasal dari luar Islam yang mempunyai dukungan budaya tidak luas (Prayitno, 2009; 31).

Dalam konteks itu, saya kira gagasan yang disampaikan oleh Alfred Stepan tentang perlunya *twin toleration* (toleransi kembar) sangat relevan bagi pengembangan demokrasi di dunia muslim, termasuk di Indonesia. Dalam gagasan ini, otoritas keagamaan tidak mengontrol pemimpin yang dipilih secara demokratis, sementara negara juga harus mempertahankan adanya ruang bebas bagi agama (Bagir, 2014; 21). Dalam konteks itu, *copy paste* demokrasi liberal untuk diterapkan di negara-negara muslim perlu ada adaptasi dan penyesuaian-penyesuian sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Seperti juga demokrasi itu sendiri, ada berbagai macam model-model demokrasi yang diterapkan di negara-negara Barat.

***

Prof. Dr. Lili Romli

Lahir di Serang, Banten, Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI, staf Pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan Pascasarjana Ilmu Politik UNAS serta Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Aktif melakukan penelitian tentang Partai Politik, Pemilu dan Pilkada, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan, dan Otonomi Daerah. Beberapa kali pernah menjadi Koordinator Penelitian tentang Partai, Pemilu dan Lembaga Perwakilan. Beberapa bukunya, antara lain, Islam Yes, Partai Islam Yes; Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal; Potret Partai Politik Pasca Orde Baru; Menggugat Partai Politik; Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru; Pemilu Era Reformasi; dan Sistem Presidensial Indonesia. Ia juga menjadi kontributor beberapa buku, antara lain, Pengawasan DPR Era Reformasi; Masa Depan Partai Islam di Indonesia; Partai dan Sistem Kepartai Era Reformasi; Fraksionalisme dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi; Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi; dan Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi.

Bibliografi

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Al-Barbasy, Ma'Mun Murod, *Politik Perda Syariat*, Jakarta; Suara Muahammadiyah, 2018.

Azca, M. Najib, "Yang Madani Namun Intoleran?: Trayektori dan Variasi Gerakan Islam Radikal di Indonesia",dalam Sidney Jones,*Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 2015.

Bagir, Zainal Abidin, "Pengantar: Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia" dalam Martin Van Bruinessen (editor), *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan, 2014

Bruinessen, Martin Van (editor), *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan, 2014.

Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 200l.

Esposito, John I. dan John O Vol, *Demokrasi di Negara-negara Muslim problem dan Prospek*. Bandung, Mizan, 1998

Effendy, Bahtiar. "Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia", *Prisma*, No.5.1995.

Hefner, Robert W, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: The Asia Foundatian dan IASI, 2001.

Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1995.

https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya. Diakses, 2 Oktober 2018.

Jones, Sidney, "Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran", dalam Sidney Jones, *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 2015,

Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Lipson, Leslie, *The Democratic Civilization*, New York: Oxford University Press, 1964.

Ma'arif, Ahmad Syafii, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta; Democracy Project, 2012,

Mulia, Siti Musdah, *Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia*, Jakarta; Democracy Project, 2012.

Rosidi, Imron, "Muslim Saleh atau Radikal: Prospek Toleransi Agama di Indonesia Pasca 212", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016.

Rozi, Syafuan (Ed.), *Demokratisasi dan Pengelolaan Politik Identitas di Indonesia*, Jakarta; Mahara Publishing dan P2P LIPI, 2016.

Saiful, Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedua Pustaka Utama, 2007.

Suadey, Ahmad, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta; The Wahid Institute, 2007. hal. 27-28.

Syamsuddin, Din 1993, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol. IV.

Sirry, Mun'im A, *Islam, Lebralisme, Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Prayitno, Adi, *Politik Akomodasi Islam, Percikan Pemikiran Politik Bahtiar Effendy*, Jakarta: UIN Press, 2009

Wright, Robin, 'Islam dan Demokrasi Liberal, Dua Visi Reformasi', dalam Mun'im A Sirry, *Islam, Lebralisme, Demokrasi*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Kendala Demokrasi di Dunia Muslim: Kasus Indonesia

Luthfi Assyaukanie, Ph.D

Buku Denny JA, *Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim* (2020), mengulas tentang kondisi-kondisi demokrasi di negara-negara muslim di dunia. Dengan anak judul "Indonesia Sebagai Model?" Denny ingin mengajak pembaca melihat Indonesia sebagai salah satu "contoh berhasil" dalam menjalankan demokrasi. Meskipun dia menggunakan tanda tanya dalam anak judul itu, Denny ingin menekankan pentingnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang bisa dijadikan model. Harapan Denny tentu bukan tanpa alasan. Sudah banyak tokoh politik dan sarjana dunia yang melihat demokrasi Indonesia sebagai harapan bagi dunia muslim. Hillary Clinton, misalnya, ketika berkunjung ke Indonesia, mengaku takjub dan memuji keberhasilan demokrasi Indonesia (*The New York Times*, 18/2/2009). Larry Diamond, ahli demokrasi asal Amerika, menganggap demokrasi Indonesia sebagai "negara demokrasi liberal" yang relatif stabil. (Warburton, 2019: 256).

Sebelum tahun 1990an, negara-negara muslim selalu dikesampingkan dalam perbincangan tentang demokrasi. Para ilmuwan politik mengenalkan istilah "*Islamic Exceptionalism,*" yang maksudnya, Islam harus dikecualikan dalam setiap pembahasan tentang demokrasi; tidak ada negara-negara

berpenduduk mayoritas muslim yang sukses menjalankan demokrasi. Istilah ini bukan tanpa alasan. Pada 1992, hanya ada satu negara muslim yang menjalankan demokrasi, yakni Mali, sebuah negara kecil di Afrika. Tapi, memasuki akhir dekade 1990an, tesis "pengecualian Islam" mulai goyah. Pada 1998, Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, mengalami transisi politik dan mulai menjalani proses demokratisasi. Lalu, orang mulai bicara tentang "pengecualian Arab" bukan lagi Islam. Namun, sejak terjadinya Musim Semi Arab pada akhir 2010, tesis pengecualian Arab pun dikesampingkan. Beberapa negara Arab mulai menjalani transisi demokrasi. Salah satu yang berhasil adalah Tunisia, negara yang memulai gelombang musim semi itu.

Pada 2019, Freedom House, lembaga yang secara rutin mengeluarkan laporan kebebasan di dunia, mencatat: hanya ada dua negara muslim yang berstatus "*Free*" (bebas penuh), yakni Senegal dan Tunisia. Indonesia sendiri berada di posisi kelima, setelah Albania dan Sierra Leone. Sejak 2014, status Indonesia turun menjadi "*Partly Free*" (separuh bebas), setelah menikmati status "*Free*" selama delapan tahun berturut-turut, yakni sejak 2006 hingga 20013. Salah satu sebab turunnya peringkat Indonesia adalah hal-hal yang terkait dengan kebebasan sipil. Freedom House secara spesifik menunjuk UU Ormas (Organisasi Masyarakat) sebagai salah satu penyebab turunnya kualitas demokrasi Indonesia. UU ini berpotensi mengekang kebebasan warga negara, khususnya kebebasan berserikat, dan memberikan ruang kepada penguasa untuk bersikap otoriter. Sebab lainnya adalah banyaknya peristiwa-peristiwa intoleransi

dan diskriminasi yang menggerogoti kebebasan di Indonesia.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami "krisis" demokrasi. Sejak 1,5 dekade terakhir, para ilmuwan sosial di berbagai negara mendiskusikan fenomena redupnya demokrasi (*democratic decline*). Yang membuat mereka cemas, krisis demokrasi itu terjadi justru di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan Selandia Baru. Di kalangan sarjana sosial, ada semacam konsensus bahwa negara-negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi tidak akan kembali lagi menjadi negara non-demokrasi. Dengan kata lain, ada satu titik dalam proses demokratisasi di mana negara-negara yang sudah memenuhi semua syarat demokrasi (terkonsolidasi), akan terus mampu menjaga demokrasinya. Tapi, fenomena global redupnya demokrasi membuka mata para ahli dan pengamat demokrasi, seperti David Runciman (2018), Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), bahwa demokrasi bisa luruh dan ambruk, termasuk di negara-negara yang sudah terkonsolidasi.

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang sudah--atau hampir--mengalami konsolidasi demokrasi kemudian mengalami kemunduran. Soal apakah demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi menjadi perdebatan banyak orang. Tapi, sebagian besar pemerhati Indonesia, seperti Bill Liddle dan Saiful Mujani, meyakini bahwa Indonesia sudah lepas dari era transisi. Dalam tulisannya, "*Indonesian Democracy from Transition to Consolidation*", Liddle dan Mujani menegaskan bahwa transisi

demokrasi di Indonesia sudah berakhir pada 2004, ketika pemilihan umum presiden diselenggarakan secara langsung dan sebagian besar institusi-institusi politik sudah berjalan dengan baik (Liddle dan Mujani, 2013). Tapi, bagi sebagian Indonesianis seperti Dirk Tomsa (2010) dan Marcus Mietzner (2012), yang terjadi dengan demokrasi Indonesia setelah 2004 bukanlah konsolidasi, tapi stagnasi. Stagnasi adalah situasi macetnya sebuah pergerakan. Artinya, setelah 2004, demokrasi Indonesia tidak bergerak. Yang justru terjadi adalah sebaliknya, demokrasi Indonesia mengalami regresi, penurunan (Kurlantzick, 2014; Power, 2018; Schäfer, 2019).

Para sarjana itu berusaha mencari sebab dan menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia mengalami stagnasi dan kemudian kemunduran? Tulisan ini akan menjelaskan sebab-sebab itu dan mengemukakan pandangan saya yang agak berbeda dari sebagian besar para Indonesianis dalam melihat sebab-sebab kemunduran demokrasi di Indonesia. Kritik saya terhadap para Indonesianis itu saya tujukan juga kepada Denny JA dalam bukunya, yang secara optimis memandang demokrasi di dunia Islam. Inti dari kritik saya adalah bahwa demokrasi di dunia Islam memiliki keterbatasan, karena adanya kendala-kendala inheren dalam fondasi negara, baik dalam bentuk konstitusi maupun undang-undang yang dimilikinya. Karena Denny JA memberikan Indonesia sebagai model, maka saya akan memfokuskan tulisan ini pada kendala-kendala demokrasi di Indonesia.

Variasi Negara Muslim

Namun, sebelum kita mendiskusikan tentang demokrasi Indonesia, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara muslim dan varian-variannya. Denny JA sudah berusaha menjelaskan negara-negara muslim itu, tapi tidak melihat kompleksitas masih-masing negara. Bagaimanapun, negara muslim tidak homogen. Perbedaan geografi, demografi, dan pengalaman politik membuat negara-negara itu memiliki keunikan-keunikan sendiri. Patut diingat baik-baik di sini, bahwa kita sedang mendiskusikan "negara muslim," bukan "negara Islam," atau negara-negara lainnya. Definisi negara muslim adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim. "Mayoritas" maksudnya lebih dari separuh atau di atas 50 persen. Ada beberapa negara yang muslimnya terbanyak, tapi tidak cukup menjadi mayoritas jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok agama lain. Guinea-Bissau misalnya, memiliki populasi muslim terbesar, yakni 45%, tapi agama-agama lain jika disatukan, jumlahnya lebih banyak dari populasi muslim. Hal yang sama terjadi pada Pantai Gading, yang memiliki populasi muslim terbanyak (43%) dibanding agama-agama lain.

Jadi, berapa jumlah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam? Jika kita pakai angka pesimis, jumlahnya 48 negara, jika kita gunakan angka optimis, jumlahnya 50. Ada dua negara, yakni Bosnia-Herzegovina dan Nigeria, yang jumlah penduduknya berada di ambang batas 50%, tergantung versi sensus yang digunakan. Demi penyederhanaan, kita anggap

saja kedua negara ini memiliki populasi 50 persen lebih. Tiga negara berada dalam status wilayah sengketa atau konflik, yakni Palestina, Sahara Barat, dan Kosovo. Tapi, secara status quo, mereka adalah negara merdeka, yang memiliki pemerintahan, konstitusi, dan kedaulatan sendiri.

Mempelajari karakter negara-negara muslim secara lebih detil, penting untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi defisit demokrasi di dunia Islam dan mengapa, dari 50 negara, hanya ada dua negara yang memiliki status bebas penuh? Mengapa sebagian negara muslim memilih bentuk pemerintahan otokrasi dan sebagian lainnya berhenti pada demokrasi elektoral? Studi-studi tentang demokrasi umumnya melakukan pendekatan kawasan terhadap negara-negara yang mereka teliti. Misalnya, demokrasi di kawasan Asia Tenggara, demokrasi di kawasan Timur Tengah, demokrasi di kawasan Asia Selatan, dan demokrasi di kawasan Amerika Latin. Dalam kasus negara-negara muslim, pendekatan kawasan saja, agaknya kurang memadai. Harus ada pendekatan lain yang bisa mengidentifikasi langsung mana negara-negara yang berpotensi menjalankan demokrasi dan mana yang tidak.

Demokrasi sangat terkait dengan fondasi legal suatu negara. Tidak mungkin sebuah negara bisa menjalankan demokrasi jika tidak didukung oleh konstitusi yang demokratis. Yang saya maksud dengan “konstitusi demokratis” adalah aturan-aturan dasar dalam sebuah negara yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Tentu saja, konstitusi yang demokratis bukan satu-satunya jaminan sebuah negara bisa sukses menjalankan

demokrasi. Tapi, tanpa konstitusi yang demokratis (atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi), mustahil demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi di negara-negara muslim bisa dilihat pertama-tama dari bagaimana konstitusi di masing-masing negara ini menyikapi demokrasi. Konstitusi yang terlalu besar memberikan wewenang pada agama (Islam), bisa menjadi hambatan utama bagi terlaksananya demokrasi. Sebaliknya, negara-negara yang konstitusinya mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi (seperti sekularisasi), punya potensi yang besar untuk menjadi demokratis.

Pembicaraan tentang demokrasi di negara-negara muslim sebaiknya dimulai dengan melihat bagaimana konstitusi di negara-negara ini menyikapi demokrasi dan bagaimana mereka meletakkan agama (Islam) dalam konstalasi negara. Salah satu pasal krusial dalam konstitusi adalah penjelasan tentang dasar negara dan bagaimana agama berperan di dalamnya. Negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan Syariah sebagai sumber utama hukum nasionalnya akan sangat mungkin memiliki hambatan dalam berdemokrasi. Sebaliknya, negara yang konstitusinya tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara memiliki peluang untuk mengembangkan demokrasi.

Berdasarkan pendekatan konstitusi ini, kita bisa membagi negara-negara muslim kepada 3 atau 4 kelompok. Kelompok pertama adalah negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan menjadikan Syariah sebagai sumber legislasinya. Kita bisa menyebut negara-negara ini sebagai "Negara Islam" (NI). Kelompok kedua adalah negara-negara

yang konstitusinya secara tegas menyebut sekularisasi atau istilah padanannya, yakni pemisahan agama dan negara. Kita bisa sebut negara-negara ini sebagai "Negara Sekular" (NS). Ketiga, negara-negara yang konstitusinya tidak secara jelas menyebut Islam atau sekularisasi sebagai dasar negara. Kita bisa menaruh mereka ke dalam satu kategori yang kita sebut "Negara Netral Agama." Kelompok ketiga ini bisa dibagi, sesuai kecenderungannya. Ada yang lebih condong ke Islam, bisa kita sebut sebagai "Semi Negara Islam" (SNI) dan ada yang condong ke sekularisasi, kita sebut saja "Semi Negara Sekular" (SNS). Mari kita bedah satu-persatu masing-masing kategori ini.

Pertama, negara Islam (NI). Ada 9 negara di dunia yang konstitusinya menyebut Islam sebagai dasar negara dan menjadikan Syariah sebagai sumber utama hukum dan sistem perundangannya. Mereka adalah Pakistan, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, Oman, Mauritania, Bahrain, dan Maldives. Penyebutan Islam sebagai dasar negara umumnya ditulis di Pasal 1 atau Pasal 2. Arab Saudi, Oman, dan Yaman, misalnya, menyebut diri sebagai "Negara Islam Arab" (*Arab Islamic State*), sementara Bahrain menyebut dirinya "Negara Arab Islam" (*Islamic Arab State*). Maldives menyebut dirinya: "Republik demokratis yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam." Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Mauritania menyebut diri mereka sebagai "Republik Islam."

Kedua, negara sekular (NS). Ada 13 negara yang konstitusinya secara terang menyebutkan diri sebagai negara sekular, yakni Turki, Burkina Faso, Kazakhstan, Mali, Chad, Senegal, Guinea,

Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgystan, Gambia, dan Kosovo. Dua negara lainnya, yakni Uzbekistan dan Niger, tidak menyebutkan kata "sekular" namun menggunakan frase "pemisahan agama dan negara". Meskipun secara konstitusi sekular, beberapa urusan agama di negara-negara ini diatur oleh pemerintah. Turki, misalnya, masih memiliki Direktorat Agama Islam (*Diyonet*) yang tugasnya mengurusi pendidikan agama dan penunjukan imam masjid.

Ketiga, negara netral agama. Perinciannya sebagai berikut. Ada 18 negara yang konstitusinya menyebut Islam sebagai agama resmi dan 1 negara, yakni Suriah, tidak menyebutnya sebagai agama resmi tapi mensyaratkan kepala negaranya (presiden) beragama Islam. Kita bisa mengkategorikan mereka sebagai Semi Negara Islam (SNI). Sebagian besar negara ini menjadikan Syariah sebagai sumber utama hukum dan sistem legislasinya. Ke-18 negara itu adalah: Bangladesh, Mesir, Aljazair, Irak, Maroko, Malaysia, Tunisia, Somalia, Yordania, Uni Emirat Arab, Libya, Palestina, Kuwait, Qatar, Djibouti, Comoros, Sahrawi atau Sahara Barat, dan Brunei Darussalam. Suriah di bawah dinasti Asad sebetulnya lebih dekat dengan semangat negara sekular atau paling tidak semi-sekular. Tapi, konstitusinya masuk kategori SNI. Karakter Brunei lebih dekat dengan Negara Islam, tapi konstitusinya tidak menyebutkan diri sebagai negara Islam.

Selanjutnya, ada 7 negara yang bisa kita masukkan dalam kelompok Semi Negara Sekular (SNS). Mereka adalah Indonesia, Nigeria, Sudan, Sierra Leon, Lebanon, Bosnia-Herzegovina, dan Albania. Konstitusi negara-negara ini tidak menyebutkan Islam

sebagai dasar negara maupun agama resmi negara, tapi juga tidak menegaskan diri sebagai negara sekular atau frase padanannya. Agama disebutkan secara netral. Konstitusi Indonesia, Albania, Bosnia, dan Sierra Leon, tidak menyebut nama agama secara spesifik, tapi kata "agama" (*religion*) disebut beberapa kali.

Dari ketiga atau keempat kategori ini, kita bisa memprediksi negara-negara mana yang punya potensi untuk menjadi demokrasi dan negara-negara mana yang kesulitan mengembangkan demokrasi. Salah satu cara melihatnya adalah dengan merujuk lembaga-lembaga yang memberikan peringkat atau indeks demokrasi. Tabel di bawah ini memberikan gambaran ada di mana kelompok-kelompok negara itu. Data ini saya ambil dari the *Economist Intelligent Uniet* (EIU), lembaga yang secara rutin mengeluarkan laporan tahunan tentang indeks demokrasi di dunia.

Indeks Demokrasi 10 Negara Muslim Teratas

No	Negara	Kat.	Populasi	%	Skor	Jenis
1	Malaysia	SNI	31.528.585	61,3	7,16	Flawed
2	Tunisia	SNI	11.565.204	99,8	6,72	Flawed
3	Indonesia	SNS	267.663.435	87,2	6,48	Flawed
4	Albania	SNS	2.866.376	58,8	5,89	Hybrid
5	Bangladesh	SNI	161.356.039	90,4	5,88	Hybrid
6	Senegal	NS	15.854.360	96,1	5,81	Hybrid
7	Maroko	SNI	36.029.138	99	5,1	Hybrid
8	Mali	NS	19.077.690	95	4,92	Hybrid
9	Kyrgyzstan	NS	6.315.800	80	4,89	Hybrid

10	Sierra Leone	SNS	7.650.154	78,6	4,86	Hybrid

Sumber: the Economist Intelligent Unit, 2019.

Tabel di atas menjelaskan, tidak ada satupun negara Islam yang masuk 10 besar negara muslim paling demokratis. Ada 3 negara sekular, 3 semi negara sekular, dan 4 semi negara Islam. Dalam tabel ini, negara netral agama (baik yang semi-Islam maupun yang semi-sekular) memiliki peluang demokrasi lebih tinggi ketimbang negara-negara sekular (dan tentu saja negara-negara Islam). Salah satu penjelasannya adalah karena negara-negara ini berusaha memberikan ruang bagi agama dan sekularisme. Negara-negara yang menerapkan prinsip sekularisasi secara kaku, seperti Turki, mendapat kesulitan dalam menegosiasikan dua kecenderungan ini, sehingga menimbulkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat. Ujung-ujungnya, negara-negara seperti ini memunculkan penguasa otoriter, baik dari latar belakang militer atau Islam.

Negara sekular, yang konstitusinya secara tegas memisahkan urusan agama dan negara sejatinya adalah negara yang paling berpeluang menjalankan demokrasi liberal. Negara-negara jenis ini tidak memiliki hambatan "legal" untuk menjalankan demokrasi. Kalau negara-negara seperti ini gagal dalam menjalankan demokrasi, umumnya karena modal sosialnya (masyarakat) kurang mendukung atau elite politiknya korup atau inkompeten. Sementara itu, negara-negara netral agama, baik yang semi-Islam (SNI) maupun semi-sekular (SNS), pada dasarnya memiliki hambatan legal, meskipun tidak separah

Negara Islam.

Dalam bagian berikut, saya akan menjelaskan dua hambatan penting yang dialami negara netral agama, dengan mengambil Indonesia sebagai contoh. Perlu saya tekankan di sini, setiap kali kita bicara tentang hambatan demokrasi, yang kita maksudkan adalah demokrasi liberal, bukan hanya demokrasi elektoral. Sebagian besar negara muslim mampu menjalani demokrasi elektoral, tapi selalu gagal atau kesulitan menaikkan dirinya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni demokrasi liberal. Apa yang para ilmuwan bicarakan belakangan ini dengan pudarnya demokrasi sebetulnya adalah redupnya demokrasi liberal. Secara elektoral, demokrasi Indonesia baik-baik saja, atau mungkin semakin matang, tapi secara substansial, ada masalah besar. Saya menyebutnya "hambatan" atau "kendala" demokrasi Indonesia.

Hambatan Konstitusi

Kendala pertama dan utama demokrasi di Indonesia adalah konstitusi. Indonesia adalah salah satu negara "netral agama" yang konstitusinya menyimpan sejumlah masalah. Dihasilkan lewat perdebatan panas, rumit, dan panjang, konstitusi Indonesia adalah hasil kompromi antara kaum sekular nasionalis dan kelompok Islam. Perdebatan tentang pembentukan konstitusi Indonesia sudah sering diulas para sarjana (Boland, 2013; Effendy, 2003). Saya tidak ingin mengulanginya di sini. Sejarah pembuatan konstitusi yang rumit ini bukan hanya menyisakan problem bagi sejarah politik Indonesia, khususnya

karena ketidakpuasan kelompok Islam, tapi juga menyimpan problem pada beberapa pasalnya. Konstitusi Indonesia adalah salah satu dokumen yang paling banyak menyebut kata "agama" di dalamnya. Tidak kurang dari 13 kali, kata agama disebut, umumnya dalam konteks penekanan pentingnya menjaga nilai dan norma. Meskipun kata "Islam" tidak disebut, agama ini memainkan peran penting dalam menafsirkan konstitusi. Hak-hak dasar yang terkait dengan keyakinan dan agama, harus tunduk pada tafsir yang dipahami oleh ortodoksi Islam. Karena itu, dalam konteks ini, kebebasan beragama, meskipun dijamin UUD, maknanya harus mengikuti tafsir dan pemahaman kelompok mayoritas. Mereka menganggap pasal-pasal pengaturan agama dalam konstitusi sebagai upaya untuk menjaga *low and order*, terlepas bahwa pasal ini bisa mendiskriminasi hak-hak minoritas, baik keyakinan yang tidak diakui oleh negara maupun ateisme.

Ketegangan antara kelompok Islam dan sekular itu terus membebani sejarah Indonesia, bahkan jauh setelah Indonesia merdeka. Setelah Soeharto jatuh pada 1998 dan parlemen baru dibentuk setahun kemudian, upaya amandemen untuk menjadikan UUD 1945 lebih demokratis dan lebih adil, tidak juga berhasil. Kelompok Islam tidak mati, bahkan tambah kuat (Bruinessen 2010 dan 2013). Mereka mencoba mendesakkan agenda Islamis, seperti mengembalikan tujuh kata dan memasukkan pasal-pasal Islami ke dalam usulan amandemen. Diskusi-diskusi UUD seperti mengalami *dejavu*. Indonesia terbelah lagi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/ sekular. Meskipun ada beberapa tambahan pasal, seperti soal

pembatasan masa jabatan presiden, isu HAM, dan otonomi daerah, dalam soal hubungan agama dan negara, konstitusi Indonesia tetap ambigu.

Salah satu sumber masalah yang kerap menjadi perdebatan di kalangan ahli dan aktivis kebebasan adalah Pasal 29, yang menyatakan "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini adalah pasal yang sudah ada pada konstitusi lama, yang kerap menjadi inspirasi kelompok Islam dan kalangan konservatif untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara religius. Pasal ini kerap dirujuk untuk melawan gerakan kebebasan yang dinilai bertentangan dengan agama. Dengan merujuk pasal ini, mereka menganggap ateisme atau keyakinan tidak adanya tuhan sebagai paham sesat yang bertentangan dengan UUD. Berbagai penelitian tentang ateisme di Indonesia menjelaskan resistensi masyarakat (kelompok beragama) terhadap ateisme karena mereka meyakini ateisme dilarang oleh UUD (Schäfer 2016; Duile 2018; Hasani 2016). Orang-orang ateis bisa tetap hidup di Indonesia, tapi mereka tidak bisa menegaskan identitas mereka ke publik. Orang yang mengaku ateis bisa dikriminalkan dan dihukum (Schäfer 2016: 265). Pasal ini menjadi payung bagi undang-undang *illiberal* lainnya, yang sudah banyak mengirimkan orang ke penjara (saya akan menjelaskannya nanti).

Pasal 29 dan Sila Pertama Pancasila (termuat dalam *preambule* konstitusi) adalah kendala utama bagi demokrasi liberal. Kendati soal ini terus menjadi perdebatan di kalangan intelektual dan sarjana di Indonesia, tafsir *mainstream* terhadap pasal

ini mengerucut pada satu kesimpulan: Indonesia tidak bisa menerima keberadaan orang ateis. Kendati kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin UUD (Pasal 28E), kebebasan tidak beragama dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan jika dinyatakan di muka umum bisa dikenakan Pasal Penodaan Agama.

Ketika proses amandemen dilakukan pada 1999-2002, tidak ada partai-partai sekular yang berani mengutak-atik Pasal 29 ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Kelompok Islam ingin mengamandemen pasal ini dengan mengembalikan tujuh kata di belakang ayat pertama (Hosen, 2007). Dengan situasi seperti itu, hampir mustahil partai krusial yang selalu menjadi rujukan kaum konservatif untuk melakukan diskriminasi, diamandemen. Bagi kaum sekular, lebih baik menerima pasal yang ada, daripada kaum Islamis meminta lebih. Dengan semakin meruyaknya konservatisme di Indonesia, ide amandemen terhadap konstitusi bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan.

Hambatan Hukum

Sumber kedua yang menjadi pemicu tindakan-tindakan yang merusak kualitas demokrasi Indonesia, baik yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah, adalah hukum dan aturan-aturan yang *illiberal*. Temuan-temuan lembaga pemeringkat demokrasi, seperti Freedom House dan the Economist Intelligence Unit (EIU) kerap merujuk peristiwa-peristiwa *illiberal* yang menyebabkan skor demokrasi dan kebebasan

Indonesia turun, atau sulit untuk naik. Mari kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa intoleran terkait erat dengan peran undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu yang paling sering memicu keresahan dan diskriminasi adalah UU tentang penodaan agama. UU ini dikeluarkan pertama kali pada 1965. Salah satu tujuannya, menertibkan keriuhan yang kerap terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan meruyaknya aliran kepercayaan dan ketegangan antara kelompok Islam dan Komunis. Kelompok Islam merasa resah dengan keberadaan aliran kepercayaan yang paraktik-praktiknya dinilai melanggar agama. Begitu juga, mereka merasa gerah dengan kampanye-kampanye PKI yang kerap menyinggung agama (Crouch, 2012:3). Untuk mengatasi itu, mereka meminta presiden Soekarno agar segera mengeluarkan aturan yang intinya melarang orang menghina agama. Merasa krusial atau Soekarno ingin mengambil hati kelompok Islam, dia meresponsnya dan mengeluarkan surat penetapan presiden yang dikenal dengan PP No. 1 Tahun 1965. Empat tahun kemudian (1969), Presiden Soeharto menaikkan statusnya menjadi UU yang dikenal dengan UU No 1/PNPS/1965 dan memasukkannya sebagai bagian dari KUHP Pasal 156a. Sejak saat itu, UU yang dikenal dengan sebutan "UU Penodaan Agama" ini berlaku sampai sekarang.

Inti dari UU ini adalah mencegah hal-hal yang dianggap melenceng dari ortodoksi agama, khususnya Islam. Pasal pertama, misalnya, menegaskan: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan*

atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu." Seperti yang bisa dilihat, artikel ini bukan hanya membatasi aktivitas ibadah kaum beragama, agar sesuai dengan ortodoksi, tapi juga melarang mereka menafsirkan ajaran-ajaran agama yang berbeda dari pemahaman *mainstream*. Dengan kata lain, pasal ini bukan hanya mengancam kebebasan beragama seseorang, tapi juga kebebasan berpandangan dan berpendapatnya. Seorang beragama yang mengajarkan suatu pemikiran agama yang berbeda dari pemahaman umum, bisa terancam hukuman penjara.

Dalam praktiknya, sudah ratusan orang diadukan karena dianggap melecehkan agama akibat penafsirannya. Sebagian kasus ini diproses dan berakhir di meja hijau. Tidak sedikit yang berlanjut ke penjara. Melissa Crouch mencatat, selama era Soeharto, setidaknya ada 29 kelompok minoritas agama yang dilarang berkegiatan, karena dianggap menyimpang dan melanggar UU ini. Setelah Reformasi, sejak 1998 hingga 2009, pelarangan terhadap aliran-aliran yang dianggap berbeda semakin meningkat. Tidak kurang dari 50 kelompok minoritas dilarang berkegiatan. (Crouch, 2012:9-10). Angkanya terus bertambah. Dengan adanya Internet dan khususnya media sosial, isu-isu penodaan agama menjadi hal biasa. Diperkuat dengan UU lain yang juga anti-liberal, yakni UU ITE, UU Penodaan Agama menjadi instrumen yang paling ampuh memberengus

kebebasan orang.

Upaya *me-review* UU itu pernah dilakukan pada 2010, tapi mengalami kegagalan. Dengan tekanan massa dan kelompok konservatif yang begitu besar, Mahkamah Konstitusi tampaknya tak mau mengambil risiko, dan memilih menolak usulan uji materi UU. Sejak gagalnya *judicial review* ke MK ini, puluhan korban jatuh. Ada kasus Alexander Aan yang dinyatakan bersalah dan dihukum 2,5 tahun penjara, ada kasus Meiliana yang dihukum 1,6 tahun penjara, ada kasus Reza Hazuwen yang dihukum 2 tahun, ada Aking Saputra yang dihukum 1,6 tahun penjara, dan ada Andrew Handoko Putra, yang dihukum 1,6 tahun penjara (Amnesty International 2014; Telle 2018).

Namun dari semua kasus yang pernah terjadi, yang paling fenomenal adalah kasus yang menimpa Basuki "Ahok" Tjahaya Purnama, mantan gubernur Jakarta, yang diputus bersalah dan dihukum dua tahun penjara. Kasus Ahok adalah peristiwa yang paling memalukan dan terburuk sepanjang sejarah kebebasan di Indonesia. Seorang pejabat negara yang cakap, diperkarakan karena dituduh menodai agama. Bahkan, tuduhannya pun dibuat-buat. Sudah banyak tulisan tentang kasus ini (lihat misalnya Peterson 2018 dan Mietzner 2019). Yang patut digarisbawahi adalah bahwa kasus Ahok lebih banyak aspek politiknya. Ahok adalah seorang Kristen, keturunan China, yang kebijakan-kebijakannya banyak merugikan pengusaha dan kelompok-kelompok intoleran di Indonesia. Saya menyebut dua kelompok ini (pengusaha dan kaum intoleran) sebagai *unholly alliance* yang memainkan peran sangat penting dalam demo-

demo anti-Ahok (Assyaukanie 2017). Tapi, kasus Ahok --dan yang lainnya-- tak akan pernah ada kalau tak ada UU Penodaan Agama.

Kendala kedua yang bersumber dari produk hukum adalah UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). UU ini dengan jelas menggerogoti kebebasan dan memberikan kontribusi besar bagi rusaknya demokrasi di Indonesia. UU ITE dikeluarkan pada 2008 dan mengalami amandemen pada 2016. Ini adalah murni undang-undang yang muncul di era demokrasi, tapi memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi kualitas demokrasi. Seperti namanya, UU ini dimaksudkan untuk merespons fenomena baru, yakni internet. Pada mulanya, UU ini dibuat untuk mengatasi banyaknya transaksi palsu, penipuan, dan peretasan di dunia maya. Belakangan, dalam proses pembuatannya, UU ini memasukkan beberapa pasal yang terkait dengan pengaturan konten. Sebagian besar masalah yang terkait dengan demokrasi dan kebebasan yang diakibatkan dari UU ini berasal dari pasal-pasal yang terkait dengan konten, yang hampir semuanya termaktub dalam Bab 7.

Ada dua pasal dalam Bab 7 yang kerap digunakan untuk menangkap orang yang kedapatan menyuarakan pendapatnya di media sosial atau di internet secara umum, yakni Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27 memuat berbagai larangan orang untuk membuat dan menyebarkan konten yang memuat pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Sedangkan Pasal 28 memuat berbagai larangan orang untuk membuat dan menyiarkan

konten yang memuat berita bohong, berita menyesatkan, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dua pasal ini kerap digunakan, baik oleh masyarakat atau pemerintah, untuk memperkarakan orang.

Patut dicatat di sini bahwa amandemen 2016 pada UU ITE mengubah jenis UU dari delik umum menjadi delik aduan. Sebelumnya, polisi bisa menangkap siapa saja yang dianggap melanggar UU ITE, tapi sejak diamandemen, polisi tidak bisa memproses suatu kasus jika tidak ada warga yang mengadukannya. Tapi, aturan ini bukannya mengurangi kasus-kasus terkait dengan pelanggaran ITE. Justru sebaliknya, orang dengan mudah datang ke kantor polisi dan memasukkan laporan pengaduan tentang apa saja yang mereka anggap melanggar UU itu. Safenet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) mencatat, selama tiga tahun, sejak versi revisi diberlakukan (Desember 2016) hingga akhir 2019, polisi menerima tak kurang dari 118 aduan dari masyarakat (Safenet, 2020). Sebagian besar tentang ujaran kebencian dan penghinaan.

Korban pertama yang dijerat UU ini adalah Prita Mulyasari, seorang ibu beranak dua, yang melakukan komplain terhadap Rumah Sakit (RS) Omni Internasional. Prita adalah pasien RS tersebut yang merasa telah didiagnosa secara salah. Dia menceritakan kasusnya lewat email secara privat, tapi kemudian menyebar ke internet. Atas tindakannya ini, dia diadukan ke polisi dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Kasus Prita menarik perhatian publik dan memicu simpati

dari berbagai kalangan. Masyarakat yang simpati dengan Prita menggalang solidaritas dengan membuat "Koin untuk Prita," untuk membantunya membayar denda, sanksi tambahan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya. Kasus Prita merupakan ancaman besar bagi kebebasan orang untuk mengemukakan pandangannya, khususnya jika dia memiliki komplain terhadap suatu perusahaan atau lembaga. Meskipun Prita tak merasa menyebarluaskan emailnya, dia terjerat Pasal 27 tentang pencemaran nama baik.

Seperti sudah disebutkan, UU ITE tak hanya digunakan oleh anggota masyarakat, perusahaan, atau lembaga yang merasa keberatan dengan suatu konten di internet. Tapi juga digunakan oleh para politisi dan pemerintah untuk menangkapi lawan-lawan politik mereka. Selama rentang 2017 dan 2019 kasus-kasus pelaporan UU ITE melonjak tajam, umumnya dipicu perbedaan politik. 2017 adalah tahun terjadinya Pilkada DKI, sedangkan 2019 adalah tahun diselenggarakannya Pemilu. Naiknya kasus-kasus ITE selama periode ini juga terkait dengan lonjakan pengguna internet di Indonesia. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pertumbuhan tajam pengguna internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, pengguna internet Indonesia berjumlah 88,1 juta (APJII, 2014). Pada 2018 angkanya menjadi 171,1 juta (APJII, 2018), atau naik hampir dua kali lipat. Pengguna Facebook di Indonesia menempati urutan ke-3 di dunia, pengguna Twitter ke-5 di dunia, dan pengguna Youtube nomor satu di Indonesia. Di tahun-tahun politik, tiga media sosial ini sangat aktif digunakan untuk bertukar informasi dan kampanye politik. Dan

sebagian besar kasus yang diadukan ke polisi bersumber dari tiga media ini.

Dari daftar nama-nama yang dilaporkan Safenet karena kasus ITE, khususnya antara rentang 2015 hingga 2019, sebagian besar terkait dengan politik atau sentimen karena keberpihakan pada kandidat tertentu dalam Pemilu. Nama-nama kondang, politisi, aktivis, dan pengusaha, tercatat di dalamnya. Sebagian laporan-laporan itu berlanjut ke meja hijau dan berujung ke penjara. Sebagian lainnya, terhenti di penyidikan, karena kekurangan bukti.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat dengan terang apa yang menjadi sebab sesungguhnya bagi redupnya demokrasi Indonesia. Para sarjana dan pengamat luar negeri menyebut sejumlah sebab, seperti naiknya populisme (Hadiz 2017), inkompetennya elit politik (Aspinall 2019; Mietzner 2012), penguasa yang tak liberal (Power 2018), dan meningkatnya konservatisme agama (Mietzner 2018). Tidak ada yang salah dari penjelasan mereka. Yang kurang adalah mempertanyakan mengapa semua sebab itu terjadi *in the first place*? Mengapa populisme muncul? Mengapa konservatisme merebak? Dan mengapa penguasa semena-mena? Saya melihat karena ada lanskap legal (dan konstitusional) yang menyediakan dan membuka peluang bagi semua sebab itu terjadi.

Penangkapan orang dan peristiwa Ahok tak akan pernah ada kalau tak ada UU Penistaan Agama. Pemenjaraan Ahmad Dhani dan lain-lain tak akan pernah ada kalau tak ada UU ITE. Akar masalah semua peristiwa yang menghancurkan kualitas demokrasi di Indonesia bersumber dari konstitusi dan produk-produk hukumnya. Tulisan ini hanya menjelaskan dua produk hukum *illiberal*, sebagai contoh. Ada beberapa produk hukum lain yang tak kalah bahayanya dari dua UU itu. Selama konstitusi Indonesia memberikan peluang bagi praktik-praktik diskriminasi dan UU yang dengan mudah digunakan oleh penguasa maupun masyarakat untuk memenjarakan orang, selama itu pula demokrasi Indonesia sulit berkembang. Konstitusi dan UU adalah fondasi bagi jalannya demokrasi. Indonesia mengandung cacat ini. Demokrasi Indonesia tak akan pernah bisa lebih baik dari apa yang sudah dicapainya selama hambatan demokrasi ini terus dipelihara.

Washington DC, 12 April 2020

***

Luthfi Assyaukanie, Ph.D

Menyelesaikan PhD-nya dalam bidang sejarah politik di Universitas Melbourne, Australia. Selain mengajar di Universitas Paramadina, Jakarta, Luthfi mendirikan dan mengelola platform riset Faktadata. Sejak Maret 2020, bekerja sebagai research fellow di National Endowment for Democracy (NED) di Washington DC, Amerika Serikat, untuk sebuah proyek penelitian tentang pudarnya demokrasi di negara-negara muslim.

Bibliografi

Amnesty International. *Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws*. London, 21 November 2014.

APJII. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta: APJII, 2014.

APJII. *Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. Jakarta: APJII, 2018

Aspinall, E. and Warburton, E. "Indonesia: The Dangers of Democratic Regression." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 129.

Aspinall, E.; Fossati, D.; Muhtadi, B.; Warburton, E. "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia." *Democratization* 2019, 1-22.

Assyaukanie, Luthfi. "Unholy alliance: Ultra-conservatism and political pragmatism in Indonesia," *Thinking ASEAN* 19, January 2017.

Bland, B. *Politics in Indonesia: Resilient Elections, Defective Democracy*. Lowy Institute, 2019.

Boland, B. J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*; Springer Science & Business Media, 2013.

Bruinessen, M. van. *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*; Routledge, 2010.

Bruinessen, M. van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*; Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

Crouch, M.A. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional

Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 2012, *7*, 1-46.

Duile, Timo. "Atheism in Indonesia." *South East Asia Research* 2018, *26* (2), 161-175.

Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*; Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Hadiz, V.R. "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2017, *53* (3), 261-278.

Hasani, I. "The Decreasing Space for Non-Religious Expression in Indonesia : The Case of Atheism," dalam Lindsey, T.; Pausacker, H. *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*; Routledge, 2016.

Hosen, N. *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*; Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

Kurlantzick, J. "Southeast Asia's Regression From Democracy and Its Implications." *Working Paper*, New York, 2014.

Levitsky, S.; Ziblatt, D. *How Democracies Die*; Crown, 2018.

Liddle, R. William dan Saiful Mujani. "Indonesian Democracy from Transition to Consolidation." Dalam Mirjam Künkler dan Alfred Stepan. *Democracy and Islam in Indonesia*. Columbia University Press, 2013.

Mietzner, Marcus. "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society." *Democratization* 2012, *19* (2), 209–229.

Mietzner, Marcus and B. Muhtadi. "The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' View of Religious Minorities and Ethnic Chinese," in Fealy, G.; Ricci, R.

Contentious Belonging: Contentious Belonging; ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2019.

Mietzner, Marcus; B. Muhtadi; R. Halida. "Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 2018, *174* (2-3), 159-187.

Mietzner, Marcus. "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." *Contemporary Southeast Asia* 2007, *29* (2), 238–263.

Osman, M.N.M. "Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement." *Indonesia* 2018, No. 106, 89–109.

Peterson, D. "Blasphemy, Human Rights, and the Case of Ahok." *The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law.* Volume 2, 2018, 52-94.

Power, T.P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2018, *54* (3), 307-338.

Runciman, D. *How Democracy Ends*; Profile, 2018.

Safenet. "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE." https://id.safenet.or.id/daftarkasus/. Diakses pada 10 April 2020.

Schäfer, Saskia. "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities." Pacific Affairs, Volume 92, Number 2, June 2019, pp. 235-255.

Schäfer, Saskia. "Forming 'Forbidden' Identities Online: Atheism in Indonesia." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 2016, *9* (2), 253–268.

Telle, K. "Faith on Trial: Blasphemy and 'Lawfare' in Indonesia." *Ethnos* 2018, *83* (2), 371–391.

Tomsa, Dirk. "Indonesian Politics in 2010: The Perils of Stagnation." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2010, *46* (3), 309-328.

Warburton, E. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." Contemporary Southeast Asia 41(2): 255-285.

Hijrah Dunia Muslim Menuju Kebebasan

Kumpulan Review Buku
Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim karya Denny JA

Denny Januar Ali atau **Denny JA** adalah entrepreneur intelektual atau intelektual entrepreneur. Ia banyak membuat terobosan di dunia akademik, politik, media sosial, sastra, dan budaya di Indonesia.

Pria kelahiran Palembang, 4 Januari 1963 ini, sejak masih duduk di bangku SMA, sudah menyukai buku karya Michael Heart, berjudul The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History. Ia menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Kemudian, ia meraih gelar Master of Public Administration dari Pittsburgh University, Amerika Serikat saat berusia 31 tahun. Sementara itu, gelar doktornya didapatkan pada 2001 dari Ohio University, Amerika Serikat.

Pada tahun 2015, Denny J.A. dinobatkan TIME Magazine sebagai salah satu dari 30 orang paling berpengaruh di Internet. Ia bersanding dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan sejumlah selebriti dunia seperti Shakira, Justin Bieber dan Kim Kardashian. Dalam Vote yang dibuat TIME Magazine, Denny J.A. berada di posisi nomor satu.